



PROPOSAL PENELITIAN

Dampak Proliferasi Nuklir di Indo-Pasifik Akibat Eskalasi *Great Power Competition* dan Implikasinya terhadap Indonesia (2017-2025)

Dr. Rika Wijiyanti, S.Si.

Dr. Rudy Sutanto, S.I.P., M.M.

Aisha Rasyidila Kusumasomatri, M.Sc.

Dr. Diah Ayu Permatasari, S.T., SIP.,S.H., M.IR

SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA

2026

HALAMAN PENGESAHAN USULAN PENELITIAN MANDIRI DOSEN

- 1 Judul Penelitian Mandiri Dosen : Dampak Proliferasi Nuklir di Indo-Pasifik Akibat Ekskalasi *Great Power Competition* dan Implikasinya terhadap Indonesia (2017-2026)
- 2 Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Dr. Rika Wijiyanti, S.Si.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIDN : 5110119201
 - d. Jabatan Struktural : -
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor
 - f. Alamat Rumah : Greenland Forest Hill Residence Blok G9-9, Semplak Barat, Kec. Kemang, Kab. Bogor, Jawa Barat 16310
 - g. No. HP : 081333537503
 - h. E-mail : rika.wijiyanti@stin.ac.id
- 3 Anggota Peneliti : 3 orang
 - a. Nama Anggota I : Dr. Rudy Sutanto, S.I.P., M.M.
 - b. Nama Anggota II : Aisha Rasyidila Kusumasomatri, M.Sc.
 - c. Nama Anggota III : Dr. Diah Ayu Permatasari, S.T., SIP., S.H., M.IR
- 4 Jangka Waktu Penelitian Mandiri Dosen : 8 bulan
- 5 Jumlah dana yang diajukan : Rp 71.250.000,00

Mengetahui,

Kepala Pusat Penelitian

Ketua Tim Peneliti,

Ulil Abrori

Rika Wijiyanti

ABSTRAK

Eskalasi *great power competition* di kawasan Indo-Pasifik sejak 2017 telah mengubah lanskap keamanan regional secara signifikan, terutama melalui percepatan modernisasi militer dan proliferasi teknologi strategis, termasuk nuklir dalam konteks militer. Dinamika tersebut menjadikan proliferasi nuklir tidak lagi sekadar isu normatif non-proliferasi, tetapi sebagai ancaman strategis yang berpotensi mempengaruhi stabilitas kawasan dan kepentingan nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana eskalasi rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok mempengaruhi proliferasi nuklir militer di Indo-Pasifik, mengkaji implikasinya terhadap kepentingan nasional Indonesia, serta mengevaluasi kesiapan dan peran intelijen Indonesia dalam melakukan deteksi dini, mitigasi, dan perumusan respons strategis nasional.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan desain studi kasus kebijakan, berparadigma interpretatif-struktural. Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan Forum Grup Discussion dengan para ahli. Kerangka analisis mengintegrasikan Intelijen, Neorealisme Struktural, *Regional Security Complex Theory*, *Security Dilemma Theory*, dan *Nuclear Deterrence Theory* untuk menjelaskan hubungan kausal antara perubahan distribusi kekuatan global, dinamika proliferasi nuklir, dan respons kebijakan Indonesia sebagai negara menengah. Model konseptual penelitian menempatkan eskalasi *great power competition* sebagai variabel bebas, proliferasi nuklir sebagai variabel intervening, dan penyesuaian kebijakan Indonesia sebagai variabel terikat.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah pemetaan komprehensif mengenai dampak proliferasi nuklir militer di Indo-Pasifik terhadap stabilitas kawasan dan kepentingan nasional Indonesia pada 2017-2025, serta identifikasi kesenjangan kapasitas intelijen dalam menghadapi ancaman tersebut. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian intelijen strategis dalam konteks proliferasi nuklir kawasan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan dasar analitis bagi penguatan sistem *early warning* dan perumusan kebijakan keamanan nasional Indonesia yang adaptif terhadap dinamika proliferasi nuklir di Indo-Pasifik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN USULAN PENELITIAN MANDIRI DOSEN	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I	vii
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Urgensi	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Rasional Pemilihan Teori.....	7
2.2 <i>Neorealism / Structural Realism</i>	8
2.2.1 Definisi dan Konsep Dasar Neorealisme (Kenneth Waltz, 1979)	8
2.2.2 Operasionalisasi Neorealisme pada Konteks Penelitian	9
2.3 <i>Regional Security Complex Theory (RSCT)</i>	11
2.3.1 Operasionalisasi RSCT pada Konteks Penelitian.....	11
2.4 <i>Security Dilemma Theory</i>	12
2.4.1 Operasionalisasi <i>Security Dilemma</i> pada Konteks Penelitian	13
2.5 <i>Nuclear Deterrence Theory</i>	14
2.5.1 Definisi dan Konsep Dasar	14
2.6 Teori Keputusan Intelijen (<i>Intelligence and Decision-Making Theory</i>)	15
2.6.1 Operasionalisasi Teori Keputusan Intelijen dalam Penelitian	16
2.7 Studi Literatur	17
2.7.1 <i>Balance of Threat</i> pada Dinamika Regional Indo-Pasifik	17
2.7.2 Proliferasi Nuklir pada Kasus AUKUS	19
2.7.3 Indo-Pasifik sebagai Regional Security Complex	20
2.7.4 Posisi Indonesia dalam Kompleks Keamanan Regional	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Pendekatan dan Paradigma Penelitian.....	24

3.2 Fokus Penelitian dan Variabel Konseptual	25
3.2.1 Fokus Penelitian	25
3.2.3 Model Konseptual Penelitian	27
3.3 Rancangan Penelitian.....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Teknik Analisis Data	32
3.6 Analisis Intelijen	33
3.7 Proses Penafsiran dan Penyimpulan Hasil Penelitian	35
3.8 Lokasi dan Jadwal Penelitian	36
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN I	44
LAMPIRAN II	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Variabel Penelitian	27
Gambar 3.2 Bagan Model Konseptual Penelitian.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	37
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 2017, dinamika keamanan global mengalami pergeseran fundamental yang ditandai oleh meningkatnya eskalasi great power competition, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Pergeseran ini tidak hanya merepresentasikan perubahan terminologi geografis dari Asia-Pasifik ke Indo-Pasifik, tetapi mencerminkan upaya kekuatan besar, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok, dalam membangun ulang tatanan geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi kawasan sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing (Almela, 2025)(Edwina et al., 2025). Indo-Pasifik diposisikan sebagai ruang strategis utama bagi proyeksi kekuatan, pengendalian jalur perdagangan global, serta kompetisi pengaruh politik, ekonomi, dan militer, sehingga menjadikannya episentrum ketegangan keamanan internasional kontemporer.

Kawasan Indo-Pasifik saat ini merupakan panggung utama persaingan dua kekuatan besar, yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat (AS). Meningkatnya kemampuan dan pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik memicu reaksi strategi AS di kawasan tersebut. Dua peristiwa penting yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pengaturan keamanan yang ada di Indo-Pasifik: Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok, dan penarikan diri AS dari Trans-Pacific Partnership (TPP) (Dai, 2025)(Huang et al., 2025)(Poon et al., 2024). Geopolitik di Indo-Pasifik memiliki banyak lapisan yang memperlihatkan banyak pola, termasuk pola yang saling tumpang tindih dan saling bertentangan (Poon et al., 2024)(Chen et al., 2024).

Tiongkok memiliki kekhawatiran besar bahwa kehadiran militer AS dan sekutunya di rantai kepulauan Indo-Pasifik dapat memutus rute perdagangan dan pasokannya. Dari sudut pandang geostrategis Beijing, tindakannya dapat dibaca sebagai upaya untuk keluar dari pengepungan yang dirasakan. Ke arah barat, jangkauannya meluas melalui BRI, yang ditujukan ke pasar Eropa, dan untuk mengamankan akses ke pasokan energi di sekitar Teluk Persia. Perluasan wilayah timurnya melalui kehadiran militer di Laut Cina Selatan, dianggap memiliki tujuan jangka panjang untuk mendorong dan membangun kedalaman strategis di Pasifik Barat. Negara-negara tetangga Tiongkok merasa terancam oleh kemajuan ini. Di sisi lain, Amerika Serikat tidak hanya menganggap Tiongkok sebagai pesaing untuk hegemoni global dan regional, tetapi juga sebagai kekuatan militer pertama yang setara sejak Perang Dunia II yang bergerak maju ke Pasifik, mendekati posisi Amerika di Guam, Hawaii, dan bahkan Pantai Baratnya. Penilaian risiko dan aspirasi strategis yang kontras ini membuat banyak pihak khawatir bahwa pemicu konfrontasi militer antara kedua kekuatan nuklir dan sekutu mereka dapat terjadi di Selat Taiwan.

Persaingan geopolitik ini akan berkembang tidak hanya bergantung pada kedua kekuatan besar, tetapi juga interaksi banyak pemain di kawasan tersebut (Edel, 2021). Mengingat pergeseran pusat gravitasi ekonomi dan politik ke Indo-

Pasifik, perkembangan di kawasan ini akan berdampak global. Indo-Pasifik merupakan kawasan dengan pertumbuhan tercepat dan ekonomi paling dinamis di dunia (Chen et al., 2024). Saat ini, sebagian besar output ekonomi global dihasilkan di kawasan Indo-Pasifik. Hal yang sama berlaku untuk sekitar dua pertiga pertumbuhan ekonomi global. Karena sekitar 90 persen perdagangan dunia dilakukan melalui laut, kawasan Indo-Pasifik juga memiliki kepentingan yang luar biasa sebagai jalur perdagangan. Sekitar seperempat perdagangan maritim global melewati Selat Malaka.

Indo-Pasifik juga merupakan kawasan dengan konflik geopolitik yang besar. Tiongkok telah memperluas posisi kekuasaannya melalui pembangunan pulau-pulau buatan dan pangkalan militer di Laut Cina Selatan, yang memicu konflik atas rute laut, sumber daya alam, dan hak penangkapan ikan (Guilfoyle et al., 2022). Selain itu, kawasan ini diwarnai oleh konflik perbatasan berkepanjangan, seperti ketegangan Tiongkok–India (Barua et al., 2025) serta rivalitas nuklir India–Pakistan (Baghel and Nüsser, 2015). Fakta bahwa negara-negara tersebut memiliki senjata nuklir meningkatkan ketidakstabilan kawasan.

Eskalasi *great power competition* juga mendorong percepatan modernisasi militer dan proliferasi teknologi strategis, termasuk nuklir. Nuklir tidak lagi dipahami sebagai senjata pemusnah massal, tetapi sebagai simbol supremasi teknologi dan instrumen strategic deterrence (Almela, 2025). Dinamika nuklir di Indo-Pasifik bersifat multipolar dan kompleks, dengan keberadaan negara pemilik senjata nuklir seperti Tiongkok, India, Pakistan, dan Korea Utara, serta potensi eskalasi di Semenanjung Korea dan Selat Taiwan (Edwina et al., 2025). Perkembangan nuklir di kawasan ini juga mencakup proliferasi teknologi nuklir non-senjata, seperti teknologi propulsi nuklir dan bahan bakar nuklir tingkat militer yang memungkinkan kemampuan nuklir laten, yang bersifat ambigu dan sulit dideteksi (Almela, 2025). Dari perspektif intelijen, proliferasi nuklir laten merupakan indikator ancaman strategis jangka panjang yang menuntut kemampuan *early warning* dan *strategic foresight* yang tinggi.

Dinamika ini semakin diperkuat dengan hadirnya pakta keamanan strategis baru antara AS, Inggris, dan Australia, bernama trilateral security partnership between Australia, the United Kingdom, and the United States (AUKUS) yang diresmikan pada 15 September 2021, yang bertujuan memperdalam hubungan pertahanan ketiga negara dengan mengintegrasikan kemampuan militer di bidang angkatan laut, dunia maya, kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan domain bawah laut lainnya, sekaligus menyiapkan landasan bagi peningkatan postur pasukan AS di Australia (Albanese, 2023)(Trnavac and Hidalgo, 2024)(Fraser and Soliman, 2023). Meskipun kapal selam bertenaga nuklir untuk militer Australia setidaknya akan tersedia sekitar satu dekade lagi pada 2040, pakta AUKUS mungkin akan menghadirkan peluang dan tantangan ketika negara-negara pihak pada pakta mengkalibrasi langkah selanjutnya. Pada saat yang sama, AUKUS berisiko mendorong negara-negara non-nuklir lainnya untuk mengejar kemampuan propulsi nuklir dengan mendorong pengayaan HEU.

Penelitian terdahulu mengenai dinamika keamanan Indo-Pasifik secara umum menempatkan kawasan ini sebagai pusat eskalasi great power competition dengan tingkat kompleksitas strategis yang tinggi. Kajian panorama nuklir Indo-Pasifik menegaskan bahwa kawasan ini menghadapi risiko eskalasi strategis yang signifikan akibat keberadaan beberapa negara pemilik senjata nuklir, modernisasi kekuatan nuklir, serta lemahnya mekanisme pengendalian senjata regional dan global (Almela, 2025). Studi ini memberikan gambaran komprehensif mengenai lanskap nuklir kawasan, namun belum secara spesifik mengaitkannya dengan implikasi intelijen bagi negara non-nuklir seperti Indonesia.

Sejumlah kajian juga menyoroti potensi eskalasi konflik di Indo-Pasifik melalui pendekatan analisis risiko dan skenario. Laporan *Potential Escalation in the Indo-Pacific* mengidentifikasi sejumlah flashpoints strategis, seperti Selat Taiwan dan Semenanjung Korea, yang berpotensi memicu eskalasi militer berisiko tinggi, termasuk eskalasi nuklir (Edwina et al., 2025). Meskipun kajian ini penting dalam memetakan risiko kawasan, fokusnya masih bersifat makro-strategis dan belum menempatkan proliferasi nuklir militer sebagai ancaman intelijen yang memerlukan deteksi dini dan analisis prediktif.

Dalam konteks proliferasi nuklir, beberapa penelitian membahas Indo-Pasifik dari perspektif stabilitas strategis dan rezim non-proliferasi. Studi-studi ini menekankan bahwa proliferasi nuklir di kawasan tidak hanya bersifat horizontal, tetapi juga vertikal melalui modernisasi dan diversifikasi sistem senjata nuklir, yang meningkatkan risiko salah persepsi dan eskalasi tidak disengaja (Almela, 2025). Namun demikian, pendekatan yang digunakan masih dominan normatif dan strategis, belum mengkaji proliferasi nuklir dalam konteks militer sebagai ancaman intelijen strategis.

Pembentukan pakta keamanan AUKUS menjadi fokus penting dalam penelitian terdahulu terkait stabilitas keamanan Indo-Pasifik. Kajian kebijakan mengenai AUKUS menyoroti implikasi transfer teknologi kapal selam bertenaga nuklir terhadap rezim non-proliferasi dan stabilitas kawasan, serta potensi dilema kebijakan bagi Indonesia sebagai negara non-nuklir (Sariguna et al., 2021). Penelitian ini menegaskan adanya risiko proliferasi nuklir laten, namun belum membahas secara mendalam kesiapan intelijen Indonesia dalam merespons ancaman tersebut.

Selain itu, kajian mengenai keamanan kawasan Indo-Pasifik juga menyoroti meningkatnya penggunaan strategi gray zone, termasuk pemanfaatan instrumen non-militer seperti coast guard dalam proyeksi kekuatan negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa eskalasi konflik di Indo-Pasifik sering berlangsung secara bertahap dan ambigu, sehingga meningkatkan risiko eskalasi strategis yang sulit dideteksi sejak dini (Guilfoyle et al., 2022). Namun, dimensi nuklir dan implikasi intelijennya belum menjadi fokus utama dalam kajian tersebut.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar studi masih berfokus pada analisis geopolitik, stabilitas

strategis, dan kebijakan normatif. Penelitian yang secara komprehensif mengkaji proliferasi nuklir dalam konteks militer sebagai konsekuensi eskalasi *great power competition* di Indo-Pasifik, serta mengaitkannya dengan kesiapan dan peran intelijen nasional Indonesia dalam melakukan deteksi dini, mitigasi, dan perumusan respons strategis masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis dampak proliferasi nuklir militer di kawasan Indo-Pasifik akibat eskalasi *great power competition* dan implikasinya terhadap Indonesia (2017–2025). Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis geopolitik, keamanan strategis, dan kajian intelijen dengan fokus pada proliferasi nuklir militer sebagai ancaman intelijen strategis. Penelitian ini tidak hanya menggeser fokus kajian dari pendekatan normatif non-proliferasi menuju analisis ancaman berbasis intelijen, tetapi juga mengidentifikasi intelligence gap dalam kesiapan Indonesia melakukan deteksi dini, mitigasi, dan perumusan respons strategis nasional terhadap ancaman proliferasi nuklir kawasan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian intelijen strategis serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan keamanan nasional Indonesia, khususnya dalam memperkuat peran intelijen sebagai *early warning system* dalam menghadapi dinamika proliferasi nuklir militer di kawasan Indo-Pasifik.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam tatanan keamanan internasional yang ideal, kawasan Indo-Pasifik seharusnya dikelola sebagai ruang strategis yang stabil, aman, dan bebas dari eskalasi konflik berisiko tinggi, termasuk ancaman proliferasi nuklir dalam konteks militer. Prinsip-prinsip non-proliferasi nuklir, pengendalian senjata, dan kepercayaan strategis antarnegara diharapkan mampu membatasi penyebaran teknologi nuklir militer serta mencegah terjadinya eskalasi konflik yang dapat mengancam stabilitas kawasan dan keselamatan negara-negara di dalamnya. Bagi Indonesia sebagai negara non-nuklir, kondisi ideal tersebut tercermin dalam terjaganya stabilitas kawasan Indo-Pasifik yang mendukung kepentingan nasional, keamanan maritim, serta pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.

Namun demikian, realitas yang berkembang menunjukkan kondisi yang berbeda. Sejak 2017, kawasan Indo-Pasifik justru mengalami eskalasi *great power competition* yang semakin intensif dan bersifat militeristik. Rivalitas antara kekuatan besar mendorong percepatan modernisasi militer, penguatan *postur deterrence*, serta proliferasi teknologi strategis berisiko tinggi, termasuk teknologi nuklir dalam konteks militer. Dinamika ini diperparah oleh melemahnya rezim pengendalian senjata global, munculnya pakta keamanan seperti AUKUS, serta meningkatnya ambiguitas strategis yang menurunkan ambang eskalasi konflik.

Dalam kondisi tersebut, proliferasi nuklir militer di Indo-Pasifik tidak lagi bersifat hipotetis, melainkan menjadi ancaman strategis yang nyata dan kompleks. Bagi Indonesia, eskalasi ini berpotensi menimbulkan dampak

langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan nasional, meskipun Indonesia tidak memiliki senjata nuklir. Pada saat yang sama, respons Indonesia terhadap dinamika tersebut masih cenderung bertumpu pada pendekatan normatif dan diplomatik melalui kerangka regional, sementara kajian dan strategi nasional yang secara khusus menempatkan proliferasi nuklir militer sebagai ancaman intelijen strategis masih relatif terbatas.

Kesenjangan tersebut menimbulkan kebutuhan mendesak untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai eskalasi *great power competition*, proliferasi nuklir militer di kawasan Indo-Pasifik, serta implikasinya terhadap Indonesia. Selain itu, diperlukan analisis kritis terhadap sejauh mana kesiapan dan peran intelijen Indonesia dalam mendeteksi, memitigasi, dan merumuskan respons strategis nasional terhadap ancaman tersebut. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana eskalasi *great power competition* di kawasan Indo-Pasifik memengaruhi proliferasi teknologi militer nuklir, ditinjau dari perspektif intelijen strategis?
- b. Bagaimana implikasi proliferasi nuklir militer di kawasan Indo-Pasifik terhadap kepentingan nasional Indonesia?
- c. Bagaimana kesiapan peran intelijen Indonesia dalam melakukan deteksi dini, mitigasi, dan perumusan respons strategis nasional?

1.3 Tujuan

- a. Menganalisis eskalasi *great power competition* di kawasan Indo-Pasifik dan pengaruhnya terhadap proliferasi nuklir dalam konteks militer dari perspektif intelijen strategis
- b. Menganalisis implikasi proliferasi nuklir militer di kawasan Indo-Pasifik terhadap kepentingan nasional Indonesia
- c. Mengevaluasi kesiapan dan peran intelijen Indonesia dalam melakukan deteksi dini, mitigasi, dan perumusan respons strategis nasional terhadap ancaman proliferasi nuklir militer di kawasan Indo-Pasifik

1.4 Urgensi

Eskalasi *great power competition* di kawasan Indo-Pasifik sejak 2017 telah mengubah secara signifikan lanskap keamanan kawasan, khususnya melalui peningkatan modernisasi militer dan proliferasi teknologi, termasuk nuklir dalam konteks militer. Dinamika tersebut menjadikan proliferasi nuklir militer bukan lagi sekadar isu normatif non-proliferasi atau kepatuhan terhadap rezim internasional, melainkan ancaman strategis nyata yang berpotensi mempengaruhi stabilitas kawasan dan kepentingan nasional negara-negara di dalamnya, termasuk Indonesia. Kondisi ini menuntut adanya kajian yang mampu membaca perubahan lingkungan strategis secara komprehensif dan berbasis analisis ancaman.

Bagi Indonesia sebagai negara non-nuklir yang berada di jantung Indo-Pasifik, eskalasi proliferasi nuklir militer kawasan memiliki implikasi strategis yang tidak dapat diabaikan. Meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam kepemilikan atau pengembangan senjata nuklir, dampak tidak langsung dari eskalasi tersebut berpotensi mengancam kepentingan nasional Indonesia, baik dalam bentuk peningkatan ketegangan kawasan, gangguan stabilitas jalur laut strategis, maupun risiko keselamatan nasional akibat eskalasi konflik dengan risiko tinggi. Namun demikian, hingga saat ini, respons Indonesia terhadap dinamika tersebut masih cenderung bertumpu pada pendekatan normatif dan diplomatik melalui kerangka regional, sementara kajian komprehensif yang menempatkan proliferasi nuklir militer sebagai ancaman strategis nasional masih relatif terbatas.

Urgensi penelitian ini juga terletak pada adanya kesenjangan dalam kajian keamanan dan intelijen. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai Indo-Pasifik dan nuklir berfokus pada aspek geopolitik, stabilitas strategis, dan rezim non-proliferasi, sementara dimensi intelijen, khususnya terkait deteksi dini, analisis ancaman, dan *strategic foresight* terhadap proliferasi nuklir militer sebagai *early warning system* bagi pengambil kebijakan belum banyak dikaji secara sistematis. Selain itu, belum terdapat kajian yang secara khusus mengevaluasi kesiapan dan peran intelijen Indonesia dalam menghadapi ancaman proliferasi nuklir militer di kawasan Indo-Pasifik. Ketiadaan kajian tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam merumuskan respons strategis nasional yang adaptif terhadap perubahan lingkungan keamanan kawasan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi mendesak untuk dilakukan guna mengidentifikasi kesenjangan kapasitas intelijen serta memberikan dasar analitis bagi penguatan peran intelijen dalam mendukung kebijakan keamanan nasional Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi strategis, akademik, dan praktis. Secara akademik, penelitian ini mengisi kekosongan kajian intelijen strategis terkait proliferasi nuklir militer di Indo-Pasifik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan rekomendasi bagi penguatan sistem deteksi dini dan perumusan respons strategis nasional Indonesia dalam menghadapi dinamika proliferasi nuklir kawasan yang semakin kompleks.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rasional Pemilihan Teori

Penelitian tentang dampak proliferasi nuklir di Indo-Pasifik akibat *great power competition* terhadap keamanan Indonesia memerlukan pendekatan teoritis yang komprehensif dan multi-level untuk menangkap kompleksitas dinamika keamanan regional. Pemilihan kombinasi teori dalam penelitian ini didasarkan pada tiga pertimbangan utama yang saling melengkapi.

Pertama, fenomena proliferasi nuklir dan kompetisi kekuatan besar di Indo-Pasifik merupakan manifestasi dari struktur sistem internasional yang anarki, di mana negara-negara berupaya memaksimalkan keamanan mereka dalam kondisi ketidakpastian strategis. Neorealisme atau *structural realism* Kenneth Waltz menyediakan fondasi teoritis untuk memahami bagaimana distribusi kapabilitas material dalam sistem internasional membentuk perilaku negara dan memicu kompetisi keamanan (Utami, 2022). Dalam konteks Indo-Pasifik, pergeseran distribusi kekuatan antara Amerika Serikat dan China menciptakan tekanan struktural yang mendorong negara-negara regional untuk menyesuaikan strategi keamanan mereka (Steff, 2024).

Kedua, dinamika interaksi keamanan antar negara di kawasan Indo-Pasifik tidak dapat dipahami hanya melalui lensa struktural global, tetapi memerlukan pemahaman tentang pola keterkaitan keamanan regional yang spesifik. *Regional Security Complex Theory* (RSCT) yang dikembangkan oleh Barry Buzan dan Ole Wæver menyediakan kerangka analitis untuk memahami bagaimana ancaman dan respons keamanan di Indo-Pasifik saling terkait dalam pola regional yang khas (Martin & Safitri, 2025). Teori ini sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana keputusan satu aktor—seperti pembentukan AUKUS—dapat memicu reaksi berantai yang memengaruhi seluruh kompleks keamanan regional, termasuk Indonesia.

Ketiga, mekanisme spesifik yang menghubungkan kompetisi kekuatan besar dengan proliferasi nuklir dan dampaknya terhadap keamanan Indonesia memerlukan teori-teori tingkat menengah (*middle-range theories*) yang dapat menjelaskan proses kausal yang lebih spesifik. *Security Dilemma Theory* menjelaskan bagaimana upaya negara untuk meningkatkan keamanannya dapat dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain, memicu spiral keamanan dan perlombaan senjata (Nurfauzi et al., 2022). Sementara itu, *Nuclear Deterrence Theory* menyediakan kerangka untuk memahami logika strategis di balik kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir, termasuk konsep *extended deterrence* yang sangat relevan dalam konteks aliansi AS di Indo-Pasifik (Zafra-Gómez, 2022).

Kombinasi teori-teori ini memungkinkan penelitian untuk menganalisis fenomena pada tiga level secara simultan: (1) level sistemik—struktur distribusi kekuatan global dan regional; (2) level interaksi—pola hubungan keamanan

antar negara dalam kompleks keamanan regional; dan (3) level unit—persepsi ancaman, kalkulasi strategis, dan respons kebijakan Indonesia sebagai negara menengah (*middle power*) dalam menghadapi tekanan eksternal.

2.2 Neorealism / Structural Realism

2.2.1 Definisi dan Konsep Dasar Neorealisme (Kenneth Waltz, 1979)

Neorealisme atau *structural realism* merupakan teori hubungan internasional yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz dalam karya monumentalnya "*Theory of International Politics*" (1979). Teori ini merupakan reformulasi dan sistematisasi dari tradisi realis klasik yang diwakili oleh pemikir seperti Thucydides, Machiavelli, Hobbes, dan Morgenthau. Waltz berupaya mengembangkan teori yang lebih parsimoni dan ilmiah dengan fokus pada struktur sistem internasional sebagai variabel independen yang menjelaskan perilaku negara.

Waltz (1979) mendefinisikan struktur sistem internasional melalui tiga elemen. Pertama, Prinsip pengorganisasian (*ordering principle*): Sistem internasional adalah anarki, artinya tidak ada otoritas sentral yang berada di atas negara-negara berdaulat. Ini berbeda dengan sistem domestik yang hierarkis dengan pemerintah sebagai otoritas tertinggi. Kedua, terdapat diferensiasi fungsi (*functional differentiation*): Dalam sistem anarki, semua negara melakukan fungsi yang sama—menjamin keamanan dan kelangsungan hidup mereka sendiri. Tidak ada spesialisasi fungsi seperti dalam sistem domestik di mana berbagai institusi memiliki fungsi yang berbeda. Ketiga, adanya distribusi kapabilitas (*distribution of capabilities*): Satu-satunya variabel struktural yang bervariasi dalam sistem internasional adalah distribusi kapabilitas material (militer, ekonomi) di antara negara-negara. Distribusi ini menentukan polaritas sistem—unipolar, bipolar, atau multipolar.

Dalam konteks penelitian Indo-Pasifik, Utami (2022) menggunakan teori neorealisme untuk menganalisis dampak AUKUS terhadap keamanan regional Asia Tenggara dan ketahanan wilayah Indonesia. Utami menjelaskan bahwa neorealisme menekankan "struktur sistem internasional (distribusi kapabilitas) sebagai determinan utama perilaku negara dan kompetisi kekuatan besar". Asumsi-asumsi kunci neorealisme meliputi:

- a. Negara sebagai aktor utama: Negara adalah aktor yang paling penting dalam hubungan internasional, meskipun aktor non-negara juga ada.
- b. Negara sebagai aktor rasional: Negara bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keamanan dan kelangsungan hidup mereka dalam kondisi ketidakpastian.
- c. Anarki sebagai kondisi struktural: Tidak adanya otoritas sentral menciptakan kondisi *self-help* di mana setiap negara harus mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menjamin keamanan.

- d. Keamanan sebagai tujuan utama: Dalam kondisi anarki, keamanan adalah tujuan utama negara. Negara mungkin mengejar tujuan lain (kesejahteraan, prestise), tetapi hanya setelah keamanan terjamin.
- e. Relative gains: Negara lebih peduli pada keuntungan relatif (*relative gains*) daripada keuntungan absolut (*absolute gains*) karena keuntungan satu negara dapat menjadi ancaman bagi negara lain.

2.2.2 Operasionalisasi Neorealisme pada Konteks Penelitian

Neorealisme menyediakan kerangka yang kuat untuk memahami proliferasi nuklir dan kompetisi kekuatan besar di Indo-Pasifik periode 2017-2025 melalui beberapa aspek. Pertama, neorealisme melihat kompetisi AS-China sebagai fenomena struktural: Dari perspektif neorealis, kompetisi AS-China adalah konsekuensi yang hampir tidak terhindarkan dari pergeseran distribusi kapabilitas. Ketika China tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dan militer terbesar kedua di dunia, struktur sistem internasional bergeser dari unipolaritas menuju bipolaritas, menciptakan kondisi untuk kompetisi strategis. Steff (2024) menganalisis kompetisi ini sebagai tabrakan antara strategi dan ambisi yang berbeda, tetapi dari perspektif neorealis, perbedaan ideologi atau nilai adalah sekunder dibandingkan dengan logika struktural. Bahkan jika AS dan China memiliki sistem politik yang sama, kompetisi akan tetap terjadi karena distribusi kapabilitas menciptakan ketidakpastian dan ketakutan tentang intensi masa depan.

Kedua, neorealisme memprediksi bahwa negara-negara akan menyeimbangkan terhadap ancaman atau kekuatan yang dominan melalui *balancing* dan *bandwagoning*. Pembentukan AUKUS, penguatan Quad, dan modernisasi aliansi bilateral AS dapat dipahami sebagai Upaya *external balancing* terhadap kebangkitan China (Cheng, 2022). Namun, tidak semua negara melakukan *balancing*. Beberapa negara ASEAN, seperti Kamboja dan Laos, cenderung melakukan *bandwagoning* dengan China karena kepentingan ekonomi dan politik domestik. Neorealisme menjelaskan variasi ini melalui perbedaan dalam persepsi ancaman, kedekatan geografis, dan kapabilitas relatif.

Ketiga, neorealisme menjelaskan bagaimana struktur anarki menciptakan *security dilemma* yang memperburuk kompetisi kekuatan besar. Upaya AS untuk mempertahankan superioritas militer melalui AUKUS, modernisasi nuklir, dan penguatan aliansi dipersepsikan oleh China sebagai upaya *containment* yang mengancam keamanan inti China. Respons China berupa ekspansi militer dan nuklir kemudian memperdalam kekhawatiran AS, menciptakan spiral keamanan (Bowers, 2022; Hiim, 2024).

Keempat, neorealisme memiliki skeptisisme tentang kemampuan institusi internasional untuk mengatasi kompetisi kekuatan besar karena institusi adalah refleksi dari distribusi kekuatan, bukan variabel independen yang dapat mengubah perilaku negara. Kraft (2017) menunjukkan bahwa sentralitas ASEAN dalam keamanan regional telah memudar karena kompetisi kekuatan

besar, mendukung prediksi neorealis bahwa institusi regional akan lemah ketika kepentingan kekuatan besar bertentangan.

Kelima, neorealisme menjelaskan proliferasi nuklir sebagai respons rasional terhadap ancaman keamanan dalam kondisi anarki. Negara yang menghadapi ancaman eksistensial dan tidak dapat mengandalkan aliansi yang kredibel akan tergoda untuk mengembangkan senjata nuklir sendiri. Hynd (2024) menganalisis kemungkinan Korea Selatan mengembangkan program nuklir sebagai respons terhadap kekhawatiran tentang kredibilitas *extended deterrence* AS dan ancaman dari Korea Utara dan China. Dari perspektif neorealis, posisi Indonesia dalam kompetisi kekuatan besar ditentukan oleh kapabilitas relatifnya dan posisi geografisnya. Sebagai negara menengah dengan kapabilitas militer yang terbatas dibandingkan dengan kekuatan besar, Indonesia masih terikat pada prinsip “bebas-aktif” sehingga satu-satunya strategi yang memungkinkan adalah melakukan *internal balancing*.

Utami (2022) menunjukkan bahwa Indonesia merespons AUKUS dengan kekhawatiran tentang perlombaan senjata dan destabilisasi regional, tetapi tidak melakukan *hard balancing* terhadap AS atau China. Sebaliknya, Indonesia mengadopsi strategi *hedging* yang menggabungkan elemen *balancing* (modernisasi pertahanan), *engagement* (diplomasi multilateral), dan mempertahankan independensi strategis (prinsip bebas-aktif).

Okcavia (2022) menganalisis strategi pertahanan Indonesia dalam kondisi VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) yang diciptakan oleh kompetisi kekuatan besar. Dari perspektif neorealis, strategi Indonesia adalah respons rasional terhadap keterbatasan kapabilitas dan ketidakpastian struktural: Indonesia tidak memiliki kapabilitas untuk melakukan *hard balancing* terhadap kekuatan besar, tetapi juga tidak ingin terjatuh dalam aliansi yang membatasi otonomi strategisnya.

Meskipun neorealisme menyediakan kerangka yang kuat untuk memahami kompetisi kekuatan besar, teori ini juga memiliki keterbatasan. Neorealisme cenderung mengabaikan peran agensi, ide, dan faktor domestik dalam membentuk perilaku negara. Dalam konteks Indo-Pasifik, faktor-faktor seperti nasionalisme, memori historis, dan politik domestik juga penting dalam membentuk persepsi ancaman dan respons kebijakan.

Neorealisme juga mengabaikan interdependensi ekonomi. Perspektif ini kurang memperhatikan bagaimana interdependensi ekonomi dapat mengurangi insentif untuk konflik. Hubungan ekonomi yang kompleks antara AS, China, dan negara-negara regional menciptakan biaya yang tinggi untuk konflik yang mungkin tidak sepenuhnya ditangkap oleh analisis neorealis.

Selain itu, neorealisme cenderung kurang memperhatikan peran norma dan institusi dalam membentuk perilaku negara. Dalam konteks Indo-Pasifik, norma-norma seperti ASEAN Way, SEANWFZ, dan tabu terhadap penggunaan senjata nuklir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan negara.

2.3 Regional Security Complex Theory (RSCT)

Regional Security Complex Theory (RSCT) dikembangkan oleh Barry Buzan dan Ole Wæver sebagai kerangka analitis untuk memahami dinamika keamanan regional dalam konteks globalisasi dan perubahan sistem internasional pasca-Perang Dingin. Teori ini pertama kali diperkenalkan dalam "*Regions and Powers: The Structure of International Security*" (Buzan & Wæver, 2003) dan merupakan pengembangan dari konsep *security complex* yang sebelumnya diajukan oleh Buzan dalam "*People, States and Fear*" (1983, 1991).

Buzan dan Wæver (2003) mendefinisikan *regional security complex* (RSC) sebagai "sekelompok negara yang proses sekuritisasi (*securitization*), desekuritisasi (*desecuritization*), atau keduanya saling terkait sedemikian rupa sehingga masalah keamanan mereka tidak dapat dianalisis atau diselesaikan secara terpisah satu sama lain". Definisi ini menekankan tiga elemen kunci: 1) Keamanan satu negara dalam kompleks tidak dapat dipahami secara terpisah dari keamanan negara-negara lain dalam kompleks yang sama (*interdependensi keamanan*). Ancaman dan respons keamanan saling terkait dalam pola regional yang khas. 2) Negara-negara dalam kompleks terlibat dalam proses sekuritisasi di mana isu-isu tertentu dikonstruksikan sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan tindakan darurat di luar prosedur politik normal. 3) RSC memiliki batas geografis yang relatif jelas, meskipun batas ini dapat berubah seiring waktu dan dapat tumpang tindih dengan kompleks lain.

Dalam konteks penelitian Indo-Pasifik, Martin dan Safitri (2025) mengaplikasikan RSCT untuk menjelaskan bagaimana "keamanan regional dipahami sebagai pola keterkaitan yang kuat antar negara tetangga yang saling memengaruhi ancaman dan respons keamanan, sehingga dinamika keamanan lebih dipengaruhi oleh interaksi regional daripada aktor global tunggal". Definisi ini menekankan bahwa meskipun kekuatan besar global seperti AS dan China memainkan peran penting, dinamika keamanan Indo-Pasifik tidak dapat direduksi menjadi kompetisi bipolar semata, tetapi harus dipahami dalam konteks pola interaksi regional yang kompleks.

Buzan dan Wæver (2003) mengidentifikasi empat level analisis dalam RSCT, yaitu 1) *domestik*, di mana proses politik domestik dan konstruksi identitas nasional yang membentuk persepsi ancaman. 2) *Regional*, yang mencakup pola interaksi keamanan antar negara dalam kompleks regional. 3) *Interregional*, atau interaksi antara kompleks keamanan regional yang berbeda. 4) *Global*, di mana kekuatan besar global terhadap dinamika keamanan regional.

2.3.1 Operasionalisasi RSCT pada Konteks Penelitian

Dalam konteks Indo-Pasifik, penentuan batas RSC menjadi kompleks karena luasnya wilayah geografis dan tumpang tindih dengan kompleks keamanan lain. Beberapa sarjana berargumen bahwa Indo-Pasifik merupakan *supercomplex* yang mencakup beberapa sub-kompleks (Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Pasifik) yang saling terkait tetapi juga memiliki dinamika internal yang distingtif.

Selain itu, di kawasan ini, struktur anarki regional dikarakterisasi oleh tidak adanya institusi keamanan regional yang kuat seperti NATO di Eropa. ASEAN, meskipun merupakan organisasi regional yang penting, tidak memiliki mekanisme keamanan kolektif yang mengikat. Ini menciptakan kondisi di mana negara-negara harus mengandalkan aliansi bilateral (terutama dengan AS) atau strategi *hedging* untuk menjamin keamanan mereka.

Indo-Pasifik periode 2017-2025 dapat dikarakterisasi sebagai transisi dari unipolaritas (dominasi AS) menuju bipolaritas (kompetisi AS-China) dengan elemen multipolaritas (peran Jepang, India, dan kekuatan menengah lainnya). Steff (2024) menunjukkan bahwa transisi polaritas ini menciptakan ketidakpastian strategis dan meningkatkan risiko konflik.

Great power RSC: Kompleks yang mencakup satu atau lebih kekuatan besar global.

Di Indo-Pasifik, konstruksi sosial keamanan sangat heterogen. Di satu sisi, terdapat memori historis tentang kolonialisme, Perang Dunia II, dan Perang Dingin yang membentuk persepsi ancaman. Di sisi lain, terdapat upaya untuk membangun identitas regional melalui ASEAN dan norma-norma seperti "ASEAN Way", SEANWFZ, dan Treaty of Amity and Cooperation (TAC). Namun, kompetisi AS-China mengancam konstruksi sosial ini dengan menciptakan tekanan untuk polarisasi.

2.4 *Security Dilemma Theory*

Security dilemma merupakan salah satu konsep sentral dalam studi keamanan internasional yang menjelaskan paradoks fundamental dalam hubungan antar negara di sistem internasional yang anarki. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh John Herz (1950) dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Robert Jervis (1978) dalam karya seminalnya "*Cooperation Under the Security Dilemma*."

Menurut Jervis (1978), *security dilemma* terjadi ketika upaya satu negara untuk meningkatkan keamanannya melalui peningkatan kapabilitas militer, pembentukan aliansi, atau modernisasi persenjataan, dipersepsikan oleh negara lain sebagai ancaman terhadap keamanan mereka, yang kemudian memicu respons serupa. Respons ini, pada gilirannya, memperdalam kekhawatiran negara pertama, menciptakan spiral keamanan (*security spiral*) yang membuat semua pihak menjadi kurang aman meskipun tidak ada pihak yang memiliki intensi agresif sejak awal.

Dalam konteks penelitian Indo-Pasifik, Nurfauzi et al. (2022) mendefinisikan *security dilemma* sebagai kondisi di mana "upaya negara untuk meningkatkan keamanannya dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain sehingga menimbulkan perlombaan senjata dan ketidakstabilan kawasan". Definisi ini menekankan dua elemen kunci: (1) persepsi ancaman yang tidak selalu sesuai dengan intensi sebenarnya, dan (2) dampak sistemik berupa perlombaan senjata dan destabilisasi regional.

Jervis (1978) mengidentifikasi dua variabel kunci yang menentukan intensitas *security dilemma*: (1) offense-defense balance—sejauh mana teknologi militer dan geografi menguntungkan pihak penyerang atau bertahan; dan (2) *offense-defense distinguishability*—sejauh mana senjata dan postur militer ofensif dapat dibedakan dari yang defensif. Ketika senjata ofensif memiliki keunggulan dan sulit dibedakan dari senjata defensif, *security dilemma* menjadi lebih intens karena setiap peningkatan kapabilitas militer akan dipersepsikan sebagai ancaman.

Booth dan Wheeler (2008) menambahkan dimensi epistemologis pada konsep ini dengan menekankan peran ketidakpastian (*uncertainty*) dan misinterpretasi (*misperception*) dalam memperburuk *security dilemma*. Dalam kondisi informasi yang tidak sempurna, negara cenderung mengadopsi asumsi *worst-case scenario* tentang intensi negara lain, yang mempercepat spiral keamanan.

2.4.1 Operasionalisasi *Security Dilemma* pada Konteks Penelitian

Security Dilemma Theory relevan untuk memahami dinamika keamanan Indo-Pasifik periode 2017-2025, terutama dalam konteks kompetisi AS-China dan dampaknya terhadap proliferasi nuklir dan stabilitas regional. Beberapa aspek relevansi teori ini meliputi:

Pertama, modernisasi militer China dan respons AS serta sekutunya menciptakan spiral keamanan klasik. Ekspansi kapabilitas militer China—termasuk modernisasi pasukan nuklir, pengembangan sistem *anti-access/area denial*(A2/AD), dan militarisasi Laut China Selatan—dipersepsikan oleh AS dan sekutunya sebagai upaya untuk mengubah *status quo* regional dan menantang hegemoni AS (Bowers, 2022). Sebagai respons, AS memperkuat kehadiran militernya di Indo-Pasifik, membentuk aliansi baru seperti AUKUS, dan meningkatkan kerja sama keamanan dengan sekutu tradisional seperti Jepang dan Korea Selatan (Zafra-Gómez, 2022).

Namun, dari perspektif China, tindakan-tindakan ini dipersepsikan sebagai upaya *containment* yang mengancam kepentingan keamanan inti China, termasuk reunifikasi dengan Taiwan dan kontrol atas wilayah maritim yang diklaim. Hiim (2024) menunjukkan bahwa ekspansi nuklir China dapat dipahami sebagai respons terhadap kekhawatiran tentang sistem pertahanan rudal AS dan senjata *counterforce* konvensional yang dapat mengancam kapabilitas serangan balasan (*second-strike capability*) China. Ini adalah manifestasi klasik dari *security dilemma*: upaya AS untuk mempertahankan superioritas strategis dipersepsikan oleh China sebagai ancaman eksistensial, memicu ekspansi nuklir yang kemudian memperdalam kekhawatiran AS.

Kedua, *offense-defense balance* di Indo-Pasifik semakin menguntungkan pihak ofensif, memperburuk *security dilemma*. Bowers (2022) berargumen bahwa perkembangan teknologi militer—termasuk rudal hipersonik, sistem *counterforce* presisi tinggi, dan integrasi sistem komando-kontrol konvensional-nuklir—menciptakan "dilema *counterforce*" yang meningkatkan risiko eskalasi. Ketika negara memiliki kemampuan untuk melakukan serangan pertama yang

melumpuhkan kapabilitas nuklir musuh, insentif untuk melakukan *preemptive strike* dalam krisis meningkat, mengurangi stabilitas strategis.

Dalam konteks ini, kapal selam bertenaga nuklir yang akan diakuisisi Australia melalui AUKUS memiliki karakteristik yang sulit dibedakan antara misi ofensif dan defensif. Kapal selam ini dapat digunakan untuk patroli defensif, tetapi juga dapat dilengkapi dengan rudal jelajah yang mampu menyerang target di daratan China (Nurfauzi et al., 2022). Ambiguitas ini memperdalam *security dilemma* karena China harus mengasumsikan skenario terburuk dan merespons dengan peningkatan kapabilitas anti-kapal selam dan ekspansi pasukan nuklirnya sendiri.

Ketiga, kurangnya transparansi dan mekanisme *confidence-building* memperburuk misinterpretasi dan mempercepat spiral keamanan. Yuan et al. (2020) menunjukkan bahwa tidak adanya dialog nuklir bilateral yang memadai antara AS dan China meningkatkan risiko mispersepsi dan miskalkulasi. Dalam kondisi ketidakpastian informasi, kedua negara cenderung mengadopsi asumsi *worst-case* tentang intensi dan kapabilitas pihak lain, yang mempercepat perlombaan senjata.

Sukin et al. (2024) menambahkan bahwa persepsi publik dan elite di negara-negara regional tentang ancaman nuklir dan risiko proliferasi membentuk tekanan domestik yang memperburuk *security dilemma*. Survei mereka di lima negara Indo-Pasifik (Australia, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan) menunjukkan tingkat "kecemasan nuklir" (*nuclear anxiety*) yang tinggi, yang menciptakan tekanan politik untuk merespons ancaman yang dipersepsikan melalui peningkatan kapabilitas militer atau penguatan aliansi.

2.5 Nuclear Deterrence Theory

2.5.1 Definisi dan Konsep Dasar

Nuclear Deterrence Theory merupakan salah satu teori paling berpengaruh dalam studi keamanan internasional, terutama sejak era Perang Dingin. Teori ini menjelaskan logika strategis di balik kepemilikan dan ancaman penggunaan senjata nuklir untuk mencegah serangan atau agresi dari negara lain. Konsep inti dari deterrence adalah bahwa negara dapat mencegah tindakan yang tidak diinginkan dari musuh dengan mengancam pembalasan yang tidak dapat diterima (*unacceptable retaliation*).

Bernard Brodie (1946), dalam "*The Absolute Weapon*", adalah salah satu pemikir pertama yang mengartikulasikan logika deterrence nuklir. Brodie berargumen bahwa senjata nuklir telah mengubah fundamental tujuan militer: "Thus far the chief purpose of our military establishment has been to win wars. From now on its chief purpose must be to avert them". Dengan kata lain, senjata nuklir tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam perang tetapi untuk mencegah perang melalui ancaman penggunaan.

Thomas Schelling (1960, 1966), dalam "*The Strategy of Conflict*" dan "*Arms and Influence*", mengembangkan teori deterrence sebagai

bentuk *coercive diplomacy* yang berbasis pada teori permainan (*game theory*) dan *rational choice*. Schelling memperkenalkan konsep-konsep kunci seperti *credibility* (kredibilitas ancaman), *commitment* (komitmen untuk melaksanakan ancaman), dan *brinkmanship* (strategi mendekati ambang perang untuk memaksa musuh mundur).

Dalam konteks penelitian Indo-Pasifik, Zafra-Gómez (2022) mendefinisikan *deterrence* sebagai kondisi di mana "kepemilikan atau ancaman penggunaan senjata nuklir dimaksudkan mencegah aksi musuh". Definisi ini menekankan dua elemen: (1) kapabilitas material (kepemilikan senjata nuklir yang kredibel), dan (2) komunikasi intensi (ancaman yang dipahami dan dipercaya oleh musuh). *Nuclear Deterrence Theory* membedakan antara beberapa tipe *deterrence*:

- a. *Deterrence by punishment*: Mencegah serangan dengan mengancam pembalasan yang menghancurkan terhadap populasi dan infrastruktur musuh (*countervalue targeting*).
- b. *Deterrence by denial*: Mencegah serangan dengan memiliki kemampuan untuk menolak musuh mencapai tujuan militernya, misalnya melalui pertahanan rudal atau kemampuan untuk menghancurkan pasukan penyerang.
- c. *Immediate deterrence*: Mencegah serangan yang akan segera terjadi dalam konteks krisis spesifik.
- d. *General deterrence*: Mencegah serangan dalam jangka panjang melalui pemeliharaan kapabilitas dan postur yang kredibel.
- e. *Extended Deterrence*: Melakukan *deterrence* nuklir dengan menggunakan kapasitas dan kemampuan nuklir milik negara aliansi.

2.6 Teori Keputusan Intelijen (*Intelligence and Decision-Making Theory*)

Intelligence and Decision-Making Theory menjelaskan hubungan antara produk intelijen dan proses pengambilan keputusan kebijakan keamanan nasional. Teori ini mengeksplorasi intelligence-policy nexus, interaksi dinamis antara produsen intelijen (komunitas intelijen) dan konsumen intelijen (pembuat kebijakan). Teori ini berangkat dari premis bahwa intelijen yang akurat dan tepat waktu meningkatkan kualitas keputusan strategis, sementara intelijen yang keliru atau terlambat dapat mengakibatkan miscalculations dan kegagalan kebijakan (Heuer, 1999).

Teori ini menekankan pentingnya kualitas, objektivitas, serta kelengkapan analisis intelijen, dan bagaimana bias, ketidakpastian, serta tekanan politik dapat mempengaruhi interpretasi data tersebut. Dalam konteks proliferasi nuklir di Indo-Pasifik, keputusan untuk mengubah kebijakan pertahanan, diplomasi, dan aliansi strategis sangat bergantung pada keakuratan dan keandalan informasi intelijen. Misalnya, risiko salah penilaian terhadap niat dan kapabilitas nuklir suatu aktor dapat mengakibatkan salah perhitungan yang berpotensi membahayakan stabilitas regional dan nasional.

Menurut Heuer (1999), proses pengambilan keputusan berbasis intelijen menghadapi sejumlah tantangan utama, di antaranya adalah ketidakpastian dan Ambiguitas. Informasi intelijen sering kali tidak lengkap, ambigu, atau bahkan bertentangan. Analis harus menafsirkan data yang tidak selalu pasti, sehingga memperbesar risiko kesalahan interpretasi. Ketidakpastian ini berdampak langsung terhadap kualitas keputusan strategis yang dibuat (Heuer, 1999). Kedua, Pembuat keputusan dan analis intelijen tidak lepas dari bias psikologis, seperti bias konfirmasi (*confirmation bias*), bias optimisme, dan efek kelompok (*groupthink*). Bias ini dapat mempengaruhi cara informasi dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan, yang akhirnya memengaruhi objektivitas analisis dan keakuratan keputusan (Heuer, 1999). Ketiga, Keputusan intelijen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan organisasi, termasuk preferensi pemimpin, agenda politik, dan dinamika antar lembaga. Tekanan ini dapat menyebabkan penyederhanaan informasi atau bahkan manipulasi data untuk mendukung tujuan tertentu (Lowenthal, 2017). Keempat, Dalam situasi krisis atau ancaman yang berkembang cepat, ketergantungan pada intelijen harus dikombinasikan dengan kemampuan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Hal ini meningkatkan risiko kesalahan jika intelijen yang disediakan belum cukup matang (Heuer, 1999).

2.6.1 Operasionalisasi Teori Keputusan Intelijen dalam Penelitian

Dalam konteks proliferasi nuklir di Indo-Pasifik, teori ini menggarisbawahi bagaimana keputusan pemerintah, khususnya dalam konteks Indonesia, tentang kebijakan keamanan, aliansi strategis, maupun upaya kontraproliferasi sangat bergantung pada bagaimana intelijen tentang niat dan kapabilitas nuklir disajikan dan dipahami. Kesalahan dalam analisis atau interpretasi intelijen bisa berujung pada salah perhitungan strategis yang memperbesar risiko konflik nuklir atau destabilitas kawasan.

Teori keputusan intelijen di dalam penelitian ini dapat dijabarkan menjadi tiga fungsi. Pertama, fungsi peringatan strategis memberikan indikasi dini tentang perubahan signifikan dalam program nuklir atau intensi strategis negara proliferator. Dalam konteks Indo-Pasifik, peringatan strategis mencakup beberapa hal. Pertama, penilaian Ancaman Peran utama intelijen adalah untuk menilai secara objektif tingkat ancaman dari program nuklir. Penilaian ini mencakup perhitungan kemampuan teknis suatu negara, termasuk berapa banyak dan jenis hulu ledak, sistem pengiriman, dan opsi pengembangan teknis dalam pengayaan uranium dan plutonium. Namun, ini bukan hanya tentang kelayakan teknis: intelijen juga berusaha untuk menguraikan motivasi "strategis" untuk mengejar kemajuan tersebut, baik itu untuk pencegahan defensif, pengaruh, atau ekspansi militer. Selain itu, intelijen menghitung garis waktu untuk produksi senjata dan mengidentifikasi potensi transfer teknologi ke aktor negara lain atau aktor non-negara. Penilaian semacam itu sangat penting untuk situasi di kawasan Indo-Pasifik terkait Korea Utara dan modernisasi persenjataan China serta kemungkinan proliferasi lebih lanjut di Asia Selatan. Penilaian ancaman yang akurat membantu pembuat kebijakan untuk

mengkalibrasi respons secara proporsional; dari diplomasi koersif, melalui sanksi ekonomi, tekanan multilateral, hingga opsi militer. Respons kebijakan tanpa intelijen yang kuat berisiko reaksi berlebihan atau meremehkan.

Selanjutnya, peringatan Strategis Fungsi kedua adalah memberikan peringatan dini tentang perubahan serius dalam kemampuan atau niat nuklir suatu negara. Peringatan strategis dimaksudkan untuk mencegah apa yang disebut kejutan strategis; kegagalan dalam perencanaan nasional suatu negara, perencanaan pertahanan, dll., ketika perubahan besar tidak terduga. Dari perspektif Indo-Pasifik, alarm strategis adalah deteksi uji coba nuklir, jaringan yang memperoleh bahan sensitif dengan cara yang tidak sah, perubahan dalam doktrin nuklir, dan tanda-tanda proliferasi horizontal dalam bentuk transmisi teknologi antar negara. Uji coba nuklir pada tahun 1998 oleh India dan Pakistan menyoroti bagaimana kekurangan deteksi atau kesalahan penilaian dapat sangat mengguncang arsitektur keamanan regional. Kurangnya peringatan dini yang memadai bukan hanya kegagalan teknis, tetapi juga kegagalan institusional untuk mengintegrasikan informasi dan menyampaikannya kepada pembuat kebijakan secara tepat waktu.

Terakhir, dukungan Operasional Intelijen, selain dari fungsi analitis, berkontribusi pada realisasi kebijakan kontra-proliferasi. Ini akan melibatkan identifikasi target sanksi ekonomi atau individu yang menjadi target sanksi, mendukung tindakan untuk mencegah bahan nuklir dan memverifikasi kepatuhan terhadap perjanjian non-proliferasi. Sebagai contoh dari fungsi yang berhasil, mari kita sebut pembongkaran jaringan proliferasi A.Q. Khan, di mana kerja sama intelijen internasional memfasilitasi pencegahan pengiriman komponen nuklir dan mengungkap jaringan pasokan global yang kompleks. Prestasi ini menggambarkan bahwa intelijen tidak hanya memiliki peran analitis tetapi juga alat operasional untuk mempertahankan sistem non-proliferasi.

Dalam kasus Indonesia, penerapan teori intelijen akan menghadapi tantangan khusus terkait keterbatasan kapabilitas teknis, ketergantungan pada kerjasama intelijen eksternal, dan lemahnya mekanisme berbagi intelijen regional di ASEAN. Namun, teori intelijen juga memberikan roadmap untuk penguatan kapasitas nasional dan regional dalam menghadapi ancaman proliferasi nuklir yang semakin kompleks di kawasan Indo-Pasifik.

2.7 Studi Literatur

2.7.1 *Balance of Threat* pada Dinamika Regional Indo-Pasifik

Aplikasi *Balance of Power/Balance of Threat Theory* pada dinamika regional Indo-Pasifik menunjukkan kompleksitas respons negara-negara terhadap kompetisi AS-China, dengan implikasi penting bagi keamanan Indonesia.

Variasi respons regional: Kraft (2017) menunjukkan bahwa kompetisi kekuatan besar telah menyebabkan memudarnya sentralitas ASEAN dalam keamanan regional. Negara-negara ASEAN menghadapi dilema antara mempertahankan kohesi organisasi dan merespons tekanan dari kekuatan

besar untuk memilih sisi. Variasi respons negara-negara ASEAN mencerminkan perbedaan dalam persepsi ancaman, kepentingan ekonomi, dan kapabilitas militer, di antara lain adalah 1) Filipina dan Vietnam melakukan *hedging* dengan memperkuat hubungan keamanan dengan AS sambil mempertahankan hubungan ekonomi dengan China. 2) Thailand dan Kamboja cenderung lebih akomodatif terhadap China karena kepentingan ekonomi dan politik domestik. 3) Singapura mempertahankan posisi netral sambil memperkuat kerja sama pertahanan dengan AS. 4) Indonesia dan Malaysia berupaya mempertahankan independensi strategis melalui strategi *hedging* yang seimbang.

Dilema aliansi untuk negara menengah: Sukin et al. (2024) mengidentifikasi dilema aliansi yang dihadapi oleh sekutu dan mitra AS di Asia Timur. Survei mereka menunjukkan bahwa publik di negara-negara seperti Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Taiwan menghadapi kecemasan nuklir yang tinggi, yang menciptakan tekanan untuk memperkuat *extended deterrence* AS. Namun, penguatan *extended deterrence* juga meningkatkan risiko "terjerat" (*entrapment*) dalam konflik AS-China yang tidak diinginkan.

Untuk Indonesia, dilema ini sangat akut. Di satu sisi, Indonesia khawatir tentang assertiveness China dan dampak AUKUS terhadap stabilitas regional (Nurfauzi et al., 2022). Di sisi lain, Indonesia tidak ingin meninggalkan prinsip bebas-aktif atau terjatuh dalam aliansi militer yang dapat membatasi otonomi strategisnya (Utami, 2022). Okcavia (2022) menunjukkan bahwa Indonesia merespons dilema ini dengan strategi yang menggabungkan elemen *hedging*, penguatan kapabilitas internal, dan diplomasi multilateral melalui ASEAN.

Implikasi untuk stabilitas regional: Martin dan Safitri (2025) berargumen bahwa dinamika *balance of power/threat* di Indo-Pasifik menciptakan risiko destabilisasi regional melalui beberapa mekanisme. Pertama, Upaya *balancing* dan *counter-balancing* antara AS-sekutu dan China memicu perlombaan senjata konvensional dan nuklir yang meningkatkan ketegangan dan risiko konflik. Kedua, tekanan untuk memilih sisi antara AS dan China mengancam kohesi ASEAN dan efektivitas institusi regional lainnya. Ketiga, Kekhawatiran tentang kredibilitas *extended deterrence* AS dapat mendorong negara-negara seperti Korea Selatan atau Jepang untuk mempertimbangkan program nuklir independen (Hynd, 2024). Keempat, Polarisasi regional dan perlombaan senjata meningkatkan kemungkinan konflik yang tidak disengaja atau eskalasi krisis.

Untuk Indonesia, implikasi dari dinamika *balance of power/threat* regional meliputi tekanan untuk memodernisasi pertahanan. Pertama, Indonesia perlu meningkatkan kapabilitas pertahanannya, terutama di domain maritim, untuk menghindari tertinggal dalam perlombaan senjata regional dan mempertahankan kedaulatan teritorial (Okcavia, 2022). Kedua, dilema diplomasi, bahwa Indonesia harus menyeimbangkan hubungan dengan AS dan China sambil mempertahankan independensi strategis dan kepemimpinan

dalam ASEAN (Elok et al., 2025). Terakhir, ancaman terhadap norma regional, yang mana dinamika *balancing* mengancam norma-norma regional yang penting bagi Indonesia, seperti SEANWFZ dan prinsip penyelesaian sengketa secara damai (Utami, 2022).

2.7.2 Proliferasi Nuklir pada Kasus AUKUS

Pembentukan AUKUS pada September 2021 dan keputusan untuk memfasilitasi akuisisi kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia merupakan studi kasus yang sangat ilustratif tentang bagaimana *security dilemma* beroperasi dalam konteks Indo-Pasifik kontemporer.

Nurfauzi et al. (2022) menganalisis AUKUS dari perspektif *security dilemma* dan menunjukkan bahwa keputusan Australia untuk mengakuisisi kapal selam bertenaga nuklir menciptakan dilema keamanan bagi Indonesia. Dari perspektif Australia, AS, dan Inggris, AUKUS adalah respons defensif terhadap ancaman yang dipersepsikan dari ekspansionisme China di Indo-Pasifik. Kapal selam bertenaga nuklir dipandang sebagai aset strategis yang diperlukan untuk mempertahankan kebebasan navigasi, melindungi jalur perdagangan maritim, dan menjaga keseimbangan kekuatan regional (Cheng, 2022).

Namun, dari perspektif China dan beberapa negara ASEAN termasuk Indonesia, AUKUS dipersepsikan sebagai langkah provokatif yang meningkatkan militarisasi kawasan dan memicu perlombaan senjata. Nurfauzi et al. (2022) mencatat bahwa pemerintah Indonesia menyatakan "kekhawatiran mendalam" (*deeply concerned*) atas perlombaan senjata yang berkelanjutan dan proyeksi kekuatan di kawasan. Indonesia khawatir bahwa AUKUS akan memprovokasi China untuk mengembangkan sistem anti-kapal selam yang lebih canggih, yang pada gilirannya akan meningkatkan ketegangan di perairan yang berdekatan dengan Indonesia.

Martin dan Safitri (2025) menambahkan bahwa AUKUS menciptakan *security dilemma* yang menempatkan Indonesia dalam posisi "terhimpit" (*jammed*) antara dua kekuatan besar. Indonesia tidak dapat mengabaikan implikasi keamanan dari AUKUS, tetapi juga tidak ingin terjebak dalam kompetisi kekuatan besar atau dipaksa untuk memilih sisi. Dilema ini diperburuk oleh fakta bahwa Indonesia memiliki komitmen normatif yang kuat terhadap Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) dan prinsip bebas-aktif dalam politik luar negeri (Utami, 2022).

Bowers (2022) menganalisis bagaimana AUKUS dan modernisasi nuklir regional menciptakan "dilema *counterforce*" yang meningkatkan risiko perang nuklir di Asia Timur. Integrasi sistem konvensional dan nuklir, dikombinasikan dengan pengembangan senjata *counterforce* presisi tinggi, menciptakan insentif untuk serangan pertama dalam krisis. Dalam skenario konflik, negara yang memiliki kapabilitas *counterforce* mungkin tergoda untuk melakukan serangan preventif terhadap aset nuklir musuh sebelum aset tersebut digunakan, yang justru meningkatkan kemungkinan eskalasi nuklir.

Untuk Indonesia, implikasi *security dilemma* dari AUKUS dan proliferasi nuklir regional sangat signifikan. Pertama, Peningkatan persepsi ancaman: Meskipun AUKUS tidak secara langsung menargetkan Indonesia, peningkatan aktivitas militer dan potensi perlombaan senjata di perairan sekitar Indonesia meningkatkan persepsi ancaman terhadap kedaulatan maritim dan keamanan nasional (Nurfauzi et al., 2022). Kedua, Tekanan untuk meningkatkan kapabilitas militer: *Security dilemma* menciptakan tekanan bagi Indonesia untuk memodernisasi kapabilitas pertahanannya, terutama di domain maritim, untuk menghindari tertinggal dalam perlombaan senjata regional (Okcavia, 2022). Ketiga, dilema aliansi: Indonesia menghadapi dilema apakah harus mempertahankan posisi non-blok atau mencari perlindungan keamanan melalui penguatan hubungan dengan salah satu kekuatan besar, dengan risiko terjatuh dalam konflik yang tidak diinginkan (Sukin et al., 2024). Keempat, erosi norma non-proliferasi: AUKUS dipersepsikan sebagai melemahkan rezim non-proliferasi nuklir dan mengancam komitmen Indonesia terhadap SEANWFZ, yang merupakan pilar penting dalam arsitektur keamanan regional Indonesia (Utami, 2022; Qiao-Franco, 2023).

Aplikasi *Security Dilemma Theory* pada kasus AUKUS menunjukkan bahwa bahkan tindakan yang dimaksudkan sebagai defensif dapat memicu spiral keamanan yang membuat semua pihak menjadi kurang aman. Untuk memitigasi *security dilemma*, diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan melalui dialog keamanan, dan mengembangkan norma dan institusi regional yang dapat mengurangi ketidakpastian dan mispersepsi.

2.7.3 Indo-Pasifik sebagai *Regional Security Complex*

Aplikasi RSCT pada Indo-Pasifik menghadapi beberapa tantangan konseptual karena luasnya wilayah geografis, heterogenitas aktor, dan kompleksitas pola interaksi keamanan. Namun, beberapa karakteristik kunci dapat diidentifikasi:

Batas dan struktur Indo-Pasifik RSC: Indo-Pasifik sebagai konsep geografis dan strategis mencakup wilayah yang sangat luas, dari pantai timur Afrika hingga pantai barat Amerika, dan dari Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik. Dalam konteks RSCT, Indo-Pasifik dapat dipahami sebagai *supercomplex* yang mencakup beberapa sub-kompleks yang saling terkait. Misalnya saja pada Asia Timur yang mencakup China, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, dan Taiwan, dengan fokus pada Semenanjung Korea, Selat Taiwan, dan Laut China Timur. Super Complex juga dapat dilihat pada Asia Tenggara yang mencakup negara-negara ASEAN, dengan fokus pada Laut China Selatan dan stabilitas regional.

Martin dan Safitri (2025) menunjukkan bahwa sub-kompleks ini saling terkait melalui beberapa mekanisme: (1) proyeksi kekuatan maritim China yang mencakup Laut China Selatan, Samudra Hindia, dan Pasifik Barat; (2) sistem aliansi *hub-and-spoke* AS yang menghubungkan sekutu di berbagai sub-region; (3) jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Asia Timur, Asia

Tenggara, dan Samudra Hindia; dan (4) isu-isu transnasional seperti terorisme, proliferasi nuklir, dan perubahan iklim.

Polaritas dan kompetisi kekuatan besar: Karakteristik paling menonjol dari Indo-Pasifik RSC periode 2017-2025 adalah transisi dari unipolaritas menuju bipolaritas dengan kompetisi AS-China sebagai sumbu utama. Steff (2024) menganalisis kompetisi ini sebagai tabrakan antara dua strategi dan ambisi yang berbeda: AS berupaya mempertahankan tatanan liberal berbasis aturan (*rules-based order*), sementara China berupaya merevisi tatanan untuk mengakomodasi kepentingannya sebagai kekuatan besar yang bangkit.

Namun, polaritas Indo-Pasifik tidak sepenuhnya bipolar karena beberapa faktor. Pertama, peran kekuatan menengah seperti Jepang, India, Australia, dan Korea Selatan memiliki kapabilitas dan kepentingan yang signifikan, yang membuat mereka bukan sekadar proxy dari AS atau China tetapi aktor dengan otonomi strategis (Khan et al., 2024). Kedua, institusi regional khususnya ASEAN, meskipun melemah, masih memainkan peran penting dalam membentuk norma dan agenda keamanan regional (Kraft, 2017). Ketiga, interdependensi ekonomi, yang memperlihatkan hubungan ekonomi yang kompleks antara AS, China, dan negara-negara regional menciptakan insentif untuk menghindari konfrontasi langsung dan mempertahankan strategi *hedging*.

Pola *amity* dan *enmity*: Konstruksi sosial keamanan di Indo-Pasifik dikarakterisasi oleh pola yang kompleks dan sering kontradiktif, termasuk memori historis Perang Dunia II, kolonialisme, dan Perang Dingin menciptakan pola permusuhan yang persisten (misalnya, hubungan Jepang-China, Jepang-Korea). Selain itu, terdapat juga sengketa teritorial seperti Laut China Selatan, Laut China Timur, Kashmir, dan isu Taiwan menciptakan *conflict formations* yang potensial. Hal lain yang berkontribusi adalah norma regional seperti ASEAN Way, SEANWFZ, dan TAC merepresentasikan upaya untuk membangun *security regime* berbasis norma. Terakhir, terdapatnya interdependensi ekonomi: Perdagangan dan investasi menciptakan kepentingan bersama yang mengurangi insentif untuk konflik.

Bowers (2022) menunjukkan bahwa pola *amity-enmity* di Indo-Pasifik semakin kompleks dengan proliferasi nuklir dan modernisasi militer. Hubungan yang secara ekonomi saling bergantung dapat tetap menjadi kompetitif atau bahkan konfrontatif dalam domain keamanan, menciptakan apa yang disebut "interdependensi asimetris" yang dapat dieksploitasi untuk tujuan strategis.

2.7.4 Posisi Indonesia dalam Kompleks Keamanan Regional

Posisi Indonesia dalam Indo-Pasifik RSC sangat penting namun juga dilematis. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, negara dengan populasi Muslim terbesar, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan pemimpin *de facto* ASEAN, Indonesia memiliki kepentingan strategis yang signifikan dalam stabilitas regional. Namun, Indonesia juga menghadapi keterbatasan kapabilitas material dan dilema strategis dalam menghadapi kompetisi kekuatan besar.

Posisi geografis strategis: Indonesia terletak di persimpangan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menghubungkan Asia Timur dengan Asia Selatan dan Australia. Posisi ini memberikan Indonesia peran penting dalam keamanan maritim regional, terutama dalam kontrol atas jalur laut strategis seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Martin dan Safitri (2025) menunjukkan bahwa posisi geografis ini membuat Indonesia tidak dapat mengisolasi diri dari dinamika keamanan regional, termasuk dampak dari AUKUS dan proliferasi nuklir.

Peran dalam ASEAN: Indonesia adalah pendiri dan pemimpin informal ASEAN, dan telah secara konsisten mempromosikan sentralitas ASEAN dalam arsitektur keamanan regional. Namun, Kraft (2017) menunjukkan bahwa kompetisi kekuatan besar telah menyebabkan mudurnya sentralitas ASEAN, menciptakan dilema bagi Indonesia: bagaimana mempertahankan kohesi dan relevansi ASEAN dalam kondisi di mana negara-negara anggota memiliki persepsi ancaman dan kepentingan yang berbeda terhadap AS dan China.

Elok et al. (2025) menganalisis tantangan diplomatik Indonesia dalam merespons modernisasi militer berbasis nuklir di Indo-Pasifik. Indonesia berupaya mempromosikan denuklirisasi dan memperkuat stabilitas regional melalui upaya diplomatik multilateral di platform seperti ASEAN, IAEA, dan Gerakan Non-Blok. Namun, Indonesia menghadapi beberapa tantangan: (1) rivalitas kekuatan besar yang membatasi ruang manuver diplomatik; (2) kepentingan yang bertentangan dalam ASEAN yang mengurangi efektivitas diplomasi kolektif; dan (3) keterbatasan sumber daya diplomatik untuk mempengaruhi kekuatan besar.

Komitmen normatif: Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap beberapa norma regional yang penting. Pada SEANWFZ (*Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone*), misalnya, Indonesia adalah salah satu pendorong utama Traktat Bangkok (1995) yang menetapkan Asia Tenggara sebagai zona bebas senjata nuklir. Utami (2022) menunjukkan bahwa AUKUS dipersepsikan sebagai ancaman terhadap SEANWFZ karena kapal selam bertenaga nuklir Australia akan beroperasi di perairan regional. Selain itu, rinsip politik luar negeri bebas-aktif yang telah menjadi identitas Indonesia sejak era Soekarno mengharuskan Indonesia untuk tidak bergabung dengan aliansi militer dan mempertahankan independensi strategis (Okcavia, 2022). Terakhir, dari karakteristik ASEAN saendiri yang menjunjung ASEAN Way, di mana ditekankan norma konsensus, non-interferensi, dan penyelesaian sengketa secara damai yang menjadi karakteristik ASEAN.

Dilema strategis: Nurfauzi et al. (2022) mengidentifikasi dilema strategis yang dihadapi Indonesia dalam konteks AUKUS dan kompetisi kekuatan besar. Indonesia berada dalam posisi "terhimpit" (*jammed*) antara dua kekuatan besar, di mana terdapat risiko pengabaian. Hal ini berarti jika Indonesia tidak memperkuat hubungan keamanan dengan AS, Indonesia mungkin diabaikan dalam arsitektur keamanan regional dan kehilangan pengaruh. Di samping itu,

jika Indonesia terlalu dekat dengan AS, Indonesia mungkin terjat dalam konflik AS-China yang tidak diinginkan dan melanggar prinsip bebas-aktif. Akan tetapi di sisi lain, jika Indonesia terlalu kritis terhadap AS dan sekutunya, Indonesia mungkin terisolasi dari kerja sama keamanan regional. Begitu juga jika Indonesia terlalu akomodatif terhadap China, Indonesia mungkin kehilangan kredibilitas sebagai pemimpin ASEAN dan menghadapi tekanan domestik.

Strategi respons: Okcavia (2022) menganalisis strategi pertahanan Indonesia dalam menghadapi AUKUS dalam kondisi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Indonesia merespons dengan strategi yang menggabungkan beberapa elemen: 1) Penguatan kapabilitas internal melalui modernisasi pertahanan, terutama di domain maritim, untuk mempertahankan kedaulatan dan menghindari tertinggal dalam perlombaan senjata regional. 2) Diplomasi multilateral dengan memperkuat peran ASEAN dan institusi multilateral lainnya untuk membentuk norma dan agenda keamanan regional. 3) Hedging, atau mempertahankan hubungan yang seimbang dengan AS dan China, menghindari komitmen eksklusif kepada salah satu pihak. 4) Norm entrepreneurship lewat promosi norma-norma seperti SEANWFZ, denuklirisasi, dan penyelesaian sengketa secara damai melalui diplomasi aktif (Qiao-Franco, 2023).

Posisi Indonesia dalam Indo-Pasifik RSC mencerminkan dilema yang dihadapi oleh banyak negara menengah dalam kompleks keamanan regional yang semakin terpolarisasi. Indonesia memiliki kepentingan strategis yang signifikan dalam stabilitas regional tetapi menghadapi keterbatasan kapabilitas dan tekanan untuk memilih sisi dalam kompetisi kekuatan besar. Kemampuan Indonesia untuk menavigasi dilema ini akan sangat menentukan keamanan nasionalnya dan stabilitas regional yang lebih luas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan (*policy-oriented qualitative research*) yang berparadigma interpretatif-struktural. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian dampak proliferasi nuklir di kawasan Indo-Pasifik dalam konteks eskalasi *Great Power Competition* (GPC) dan implikasinya terhadap kebijakan Indonesia merupakan fenomena strategis yang bersifat kompleks, kontekstual, dan sarat makna politik. Fenomena tersebut tidak dapat direduksi menjadi hubungan variabel kuantitatif semata, melainkan menuntut pemahaman mendalam terhadap proses, interaksi aktor, konstruksi ancaman, serta dinamika formulasi kebijakan.

Secara ontologis, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa realitas keamanan internasional bersifat struktural sekaligus konstruktif. Pada satu sisi, distribusi kekuatan dalam sistem internasional membentuk pola perilaku negara sebagaimana dijelaskan dalam neorealisme struktural (Waltz, 1979). Namun pada sisi lain, ancaman keamanan tidak hanya ditentukan oleh kapabilitas material, melainkan juga oleh proses konstruksi makna melalui praktik politik dan komunikasi, sebagaimana dijelaskan dalam teori sekuritisasi (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Oleh karena itu, proliferasi nuklir dalam konteks GPC dipahami bukan hanya sebagai fakta militer-strategis, tetapi sebagai isu yang memperoleh makna ancaman melalui interaksi diskursif dan kebijakan.

Secara epistemologis, penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif, yang memandang pengetahuan sebagai hasil proses penafsiran reflektif terhadap data dalam konteks sosial dan politik tertentu (Schwandt, 2014; Denzin & Lincoln, 2018). Peneliti tidak diposisikan sebagai pengamat netral yang sepenuhnya terpisah dari realitas, melainkan sebagai analis yang secara sistematis menafsirkan dinamika kebijakan berdasarkan kerangka teori dan bukti empiris. Dalam konteks penelitian kebijakan, pendekatan ini relevan karena keputusan strategis negara tidak hanya didasarkan pada rasionalitas instrumental, tetapi juga pada persepsi ancaman, kepentingan nasional, serta kalkulasi legitimasi internasional (Dunn, 2018).

Secara metodologis, penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Dimensi deskriptif bertujuan memetakan dinamika proliferasi nuklir dan eskalasi GPC di Indo-Pasifik periode 2017–2025, termasuk perubahan kebijakan negara-negara besar serta implikasi regionalnya. Dimensi analitik diarahkan untuk menjelaskan hubungan konseptual antara struktur sistem internasional, dinamika *security dilemma* (Herz, 1950; Jervis, 1978), dan respons kebijakan Indonesia sebagai negara menengah (*middle power*). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana dan mengapa kebijakan Indonesia terbentuk dalam konteks tekanan struktural tersebut.

Pendekatan kualitatif dalam studi keamanan dan kebijakan publik telah diakui sebagai metode yang tepat untuk menganalisis proses pengambilan

keputusan, interaksi aktor, serta dinamika institusional yang tidak dapat diobservasi melalui angka statistik semata (George & Bennett, 2005; Creswell, 2014). Dalam konteks ini, penelitian menggunakan logika *explanatory case-oriented analysis*, dengan Indonesia sebagai fokus utama analisis kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri proses sebab-akibat (*process tracing*) antara eskalasi GPC, proliferasi nuklir, dan respons strategis Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga berada dalam tradisi *policy research*, yaitu penelitian yang tidak hanya bertujuan menghasilkan kontribusi teoretis, tetapi juga rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) (Dunn, 2018). Oleh karena itu, pendekatan metodologis yang digunakan dirancang untuk menjembatani analisis teoretis keamanan internasional dengan kebutuhan praktis perumusan strategi diplomasi dan pertahanan nasional.

Dengan demikian, pemilihan pendekatan kualitatif berparadigma interpretatif-struktural dalam penelitian ini didasarkan pada tiga pertimbangan utama:

- a. Karakter fenomena proliferasi nuklir dan GPC yang bersifat multidimensional dan kontekstual.
- b. Kebutuhan untuk menganalisis proses kebijakan dan interaksi aktor secara mendalam.
- c. Tujuan penelitian yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga strategis dalam mendukung perumusan kebijakan nasional.

Pendekatan ini memberikan landasan metodologis yang kuat untuk memahami dinamika keamanan regional secara sistemik sekaligus menjelaskan bagaimana Indonesia menavigasi tekanan struktural global melalui strategi kebijakan yang rasional dan kontekstual.

3.2 Fokus Penelitian dan Variabel Konseptual

3.2.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis dampak proliferasi nuklir di kawasan Indo-Pasifik akibat eskalasi *Great Power Competition* (GPC) serta implikasinya terhadap kebijakan keamanan dan diplomasi Indonesia periode 2017–2025 dengan menitikberatkan pada tiga dimensi utama: Dimensi Struktural Sistem Internasional, yaitu perubahan distribusi kekuatan global akibat rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok dalam konteks Indo-Pasifik (Waltz, 1979; Mearsheimer, 2001). Dimensi Dinamika Proliferasi Nuklir, termasuk bentuk proliferasi horizontal dan vertikal serta implikasinya terhadap *security dilemma* regional (Herz, 1950; Jervis, 1978). Dan dimensi Respons Kebijakan Nasional Indonesia, khususnya dalam bidang diplomasi, pertahanan, dan strategi *middle power* dalam menghadapi tekanan struktural (Cooper, 1997; Acharya, 2014).

Fokus ini dipilih karena dalam kajian keamanan internasional, respons negara terhadap tekanan sistemik tidak hanya ditentukan oleh kapabilitas material, tetapi juga oleh persepsi ancaman dan strategi adaptif kebijakan (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Oleh karena itu, penelitian tidak hanya

memetakan fakta proliferasi, tetapi menganalisis bagaimana dinamika tersebut memengaruhi proses formulasi dan penyesuaian kebijakan Indonesia.

Secara metodologis, penentuan fokus penelitian mengikuti prinsip *analytical bounding* dalam studi kebijakan dan studi kasus, yaitu membatasi ruang lingkup agar analisis tetap sistematis dan mendalam (Yin, 2018; George & Bennett, 2005). Batasan penelitian mencakup Periode waktu: 2017–2025 dengan Kawasan geografis: Indo-Pasifik.

Unit analisis utama: Kebijakan keamanan dan diplomasi Indonesia.

3.2.2 Variabel Konseptual Penelitian

Dalam penelitian kualitatif kebijakan, variabel tidak diperlakukan sebagai konstruk statistik, melainkan sebagai alat bantu konseptual untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat secara analitis (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tiga variabel konseptual utama:

1. Variabel Bebas

Eskalasi Great Power Competition (GPC) dimana Eskalasi rivalitas strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Indo-Pasifik yang ditandai oleh kompetisi militer, ekonomi, teknologi, dan geopolitik. Dalam kerangka neorealisme struktural, perubahan distribusi kekuatan menciptakan tekanan sistemik terhadap negara lain (Waltz, 1979; Mearsheimer, 2001). Indikator konseptual meliputi:

- a. Jumlah dan frekuensi latihan militer bersama besar di kawasan.
- b. Peningkatan anggaran pertahanan negara-negara GPC (AS, China, Rusia).
- c. Jumlah doktrin strategis baru yang menyebut nuklir
- d. Frekuensi pernyataan resmi atau ancaman nuklir dalam forum internasional

2. Variabel Intervening

Proliferasi nuklir dipahami sebagai konsekuensi logis dari ketidakpastian sistem internasional yang anarkis (Waltz, 1979), serta sebagai pemicu spiral ketidakamanan (*security dilemma*) (Herz, 1950; Jervis, 1978). Dalam perspektif sekuritisasi, proliferasi nuklir juga merupakan konstruksi ancaman yang membentuk prioritas kebijakan (Buzan et al., 1998). Indikator konseptual meliputi:

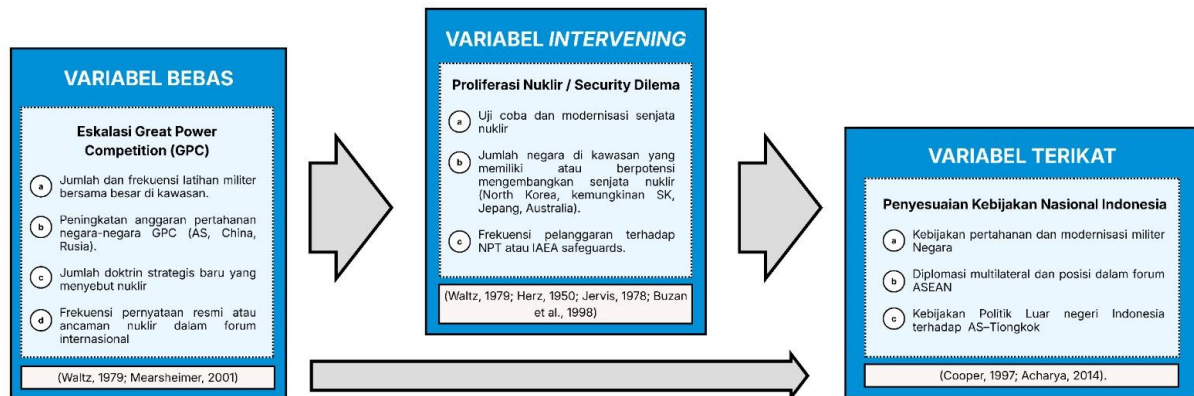
- a. Uji coba dan modernisasi senjata nuklir
- b. Jumlah negara di kawasan yang memiliki atau berpotensi mengembangkan senjata nuklir (North Korea, kemungkinan SK, Jepang, Australia).
- c. Frekuensi pelanggaran terhadap NPT atau IAEA safeguards.

3. Variabel Terikat

Merujuk pada respons kebijakan nasional Indonesia dalam bidang diplomasi, pertahanan, dan stabilitas kawasan sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan struktural dan dinamika proliferasi. Dalam literatur *middle power diplomacy*, negara menengah cenderung menggunakan strategi

hedging, engagement multilateral, dan norm entrepreneurship (Cooper, 1997; Acharya, 2014). Indikator konseptual meliputi:

- Kebijakan pertahanan dan modernisasi militer Negara
- Diplomasi multilateral dan posisi dalam forum ASEAN
- Kebijakan Politik Luar negeri Indonesia terhadap AS–Tiongkok



Gambar 3.1 Bagan Variabel Penelitian

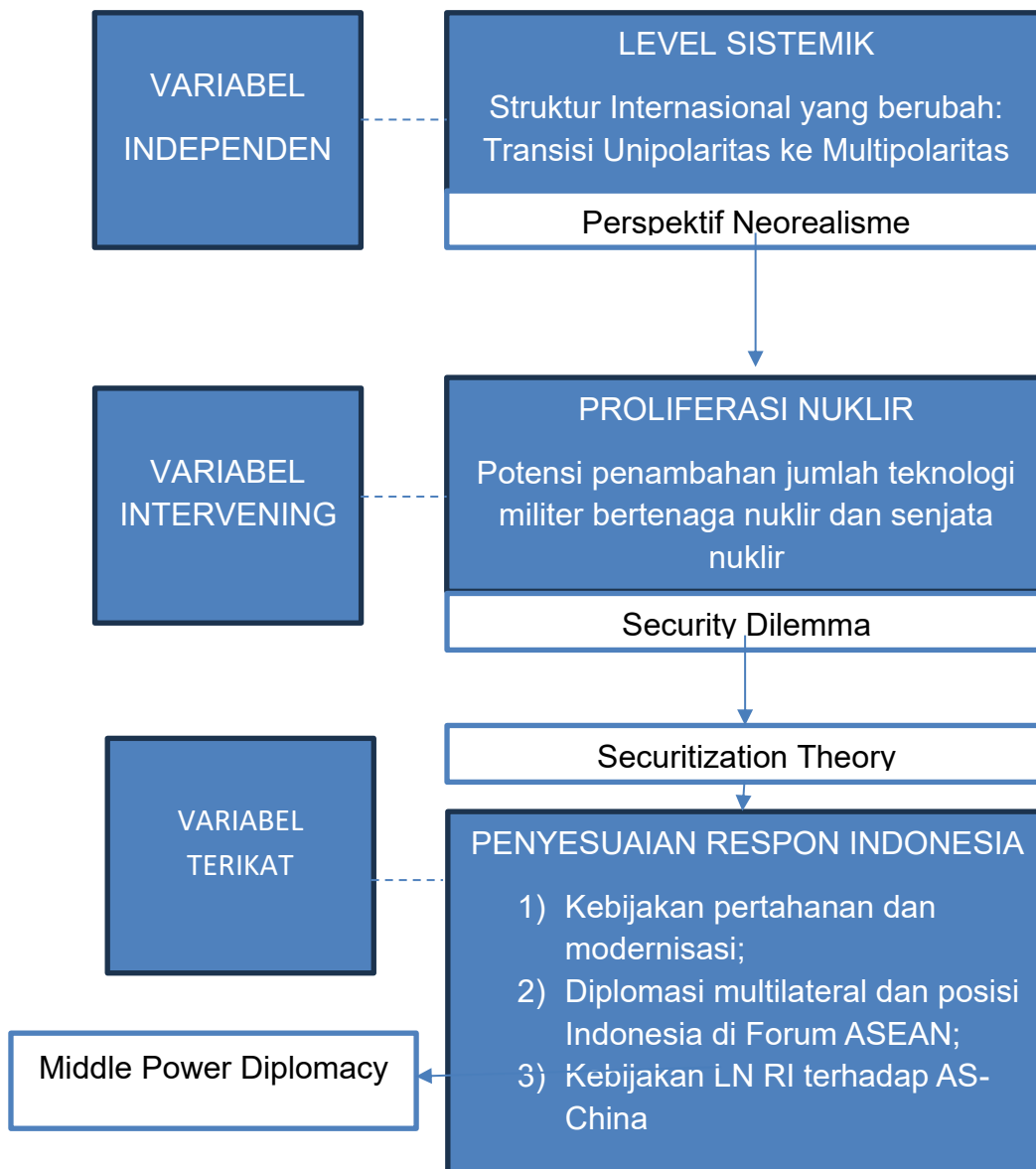
3.2.3 Model Konseptual Penelitian

Berdasarkan variabel di atas, model konseptual penelitian dirumuskan sebagai berikut:

Eskalasi *Great Power Competition* → Proliferasi Nuklir / Security Dilemma → Penyesuaian Kebijakan Indonesia

Model ini mengikuti logika kausal dalam analisis sistem internasional (Waltz, 1979) yang dimediasi oleh dinamika persepsi ancaman dan interaksi regional (Jervis, 1978), serta diterjemahkan dalam bentuk kebijakan nasional (Dunn, 2018). Secara teoretis, model ini mengintegrasikan:

- Neorealisme Struktural (Waltz, 1979)
- Security Dilemma Theory* (Herz, 1950; Jervis, 1978)
- Securitization Theory* (Buzan et al., 1998)
- Middle Power Diplomacy* (Cooper, 1997)



Gambar 3.2 Bagan Model Konseptual Penelitian

3.3 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai studi kualitatif deskriptif–analitis dengan orientasi analisis kebijakan (*policy-oriented qualitative research*). Rancangan ini dipilih karena objek penelitian dampak proliferasi nuklir di Indo-Pasifik akibat eskalasi *Great Power Competition* (GPC) dan implikasinya terhadap kebijakan Indonesia merupakan fenomena strategis yang kompleks, dinamis, dan kontekstual. Oleh karena itu, penelitian tidak diarahkan untuk menguji hipotesis kuantitatif, melainkan untuk memahami proses, pola interaksi, dan mekanisme kausal yang membentuk respons kebijakan Indonesia.

Secara desain, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kebijakan (*policy case study*) dengan Indonesia sebagai fokus utama analisis. Studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kontemporer dalam konteks nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak dapat dipisahkan secara tegas (Yin, 2018). Dalam penelitian ini, proliferasi nuklir dan dinamika GPC tidak dapat dipahami terpisah dari konteks regional Indo-Pasifik dan posisi strategis Indonesia sebagai negara menengah.

Rancangan penelitian bersifat deskriptif, karena bertujuan memetakan secara sistematis dinamika eskalasi GPC, perkembangan proliferasi nuklir di kawasan, serta evolusi kebijakan Indonesia pada periode 2017–2025. Pemetaan ini mencakup perubahan kebijakan pertahanan, diplomasi multilateral, serta respons Indonesia dalam forum regional dan global. Deskripsi dilakukan secara kronologis dan tematik untuk menangkap dinamika perubahan kebijakan dalam konteks tekanan struktural sistem internasional.

Pada saat yang sama, penelitian ini bersifat analitis, karena tidak berhenti pada pemaparan fakta, tetapi menelaah hubungan kausal antara eskalasi GPC, dinamika *security dilemma*, dan penyesuaian kebijakan nasional. Analisis dilakukan dengan menggunakan logika *process tracing* untuk mengidentifikasi mekanisme yang menghubungkan perubahan struktur internasional dengan respons kebijakan domestik (George & Bennett, 2005). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menjelaskan bagaimana tekanan sistemik diterjemahkan ke dalam keputusan strategis pada level nasional.

Secara konseptual, rancangan penelitian ini memadukan pendekatan sistemik dalam teori neorealisme (Waltz, 1979) dengan pendekatan konstruktif dalam teori sekuritisasi (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Kombinasi ini relevan karena kebijakan keamanan negara tidak hanya dipengaruhi oleh distribusi kekuatan material, tetapi juga oleh persepsi ancaman dan konstruksi wacana keamanan. Dengan demikian, rancangan penelitian ini memungkinkan analisis yang bersifat struktural sekaligus interpretatif.

Penelitian ini juga mengikuti prinsip *analytical generalization*, bukan generalisasi statistik (Yin, 2018). Artinya, temuan penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara numerik ke seluruh negara, tetapi untuk memperkuat dan menguji relevansi kerangka teori keamanan internasional dalam konteks Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan

kontribusi teoretis sekaligus rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-informed policy research*) (Dunn, 2018).

Rancangan penelitian dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- a. Identifikasi konteks struktural, yaitu memetakan eskalasi GPC dan perkembangan proliferasi nuklir di Indo-Pasifik.
- b. Analisis dinamika regional, termasuk interaksi antar-aktor dan implikasinya terhadap stabilitas kawasan.
- c. Analisis respons kebijakan Indonesia, mencakup perumusan, implementasi, dan penyesuaian strategi diplomasi dan pertahanan.
- d. Sintesis analitis, yaitu menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teoretis untuk menghasilkan penjelasan sistematis dan rekomendasi kebijakan.

Rancangan ini bersifat fleksibel dan iteratif, di mana proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara paralel untuk menjaga sensitivitas terhadap dinamika isu yang berkembang (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Pendekatan ini sesuai dengan karakter penelitian kebijakan yang menuntut ketajaman analisis sekaligus relevansi praktis.

Dengan demikian, rancangan penelitian ini memberikan kerangka metodologis yang kokoh untuk memahami secara komprehensif dampak proliferasi nuklir dalam konteks GPC serta implikasinya terhadap strategi keamanan Indonesia, dengan tetap menjaga integritas akademik dan relevansi kebijakan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang untuk mendukung analisis kebijakan yang bersifat deskriptif–analitis terhadap dampak proliferasi nuklir di Indo-Pasifik dan implikasinya bagi Indonesia. Mengingat karakter penelitian yang berparadigma kualitatif dan berorientasi kebijakan, sumber data utama berasal dari dokumen resmi, arsip strategis, serta literatur akademik bereputasi yang relevan dengan dinamika *Great Power Competition* (GPC), proliferasi nuklir, dan respons kebijakan Indonesia.

Metode utama yang digunakan adalah studi dokumentasi (*documentary research*). Studi dokumentasi merupakan teknik sistematis untuk menelusuri, mengevaluasi, dan menginterpretasikan dokumen guna memperoleh pemahaman kontekstual terhadap suatu fenomena kebijakan (Bowen, 2009). Dalam penelitian kebijakan dan studi keamanan internasional, dokumen resmi menjadi sumber primer karena merekam orientasi strategis negara, pernyataan posisi diplomatik, serta perubahan kebijakan secara formal (Yin, 2018). Dokumen yang dikaji mencakup kebijakan pertahanan dan diplomasi Indonesia, pernyataan resmi pemerintah, dokumen strategis nasional, serta arsip komunikasi dalam forum regional dan internasional.

Selain dokumen nasional, penelitian ini juga menggunakan laporan dan *white papers* pertahanan dari negara-negara besar yang relevan dengan eskalasi GPC, serta laporan lembaga internasional dan rezim non-proliferasi.

Laporan lembaga riset strategis seperti SIPRI dan IISS digunakan untuk memetakan perkembangan kapabilitas militer dan tren proliferasi nuklir. Integrasi sumber-sumber ini penting untuk menjaga kedalaman analisis dan menghindari bias perspektif tunggal, sebagaimana dianjurkan dalam prinsip triangulasi kualitatif (Denzin, 1978; Lincoln & Guba, 1985). Artikel jurnal seperti *International Security*, *Security Studies*, dan *Journal of Strategic Studies* digunakan untuk memahami perkembangan konseptual mengenai *security dilemma*, sekuritisasi, dan strategi negara menengah. Dalam penelitian kualitatif kebijakan, integrasi antara literatur dan dokumen empiris merupakan bagian dari proses analisis yang saling memperkaya (Creswell, 2014; Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Pemilihan data dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan relevansi langsung terhadap fokus penelitian dan kontribusinya terhadap analisis hubungan antara GPC, proliferasi nuklir, dan kebijakan Indonesia (Patton, 2002). Kriteria pemilihan sumber meliputi: (1) relevansi terhadap periode 2017–2025; (2) kredibilitas dan otoritas sumber; (3) keterkaitan langsung dengan isu proliferasi dan dinamika Indo-Pasifik; serta (4) potensi kontribusi terhadap analisis kebijakan nasional. Pendekatan purposif ini memastikan bahwa data yang digunakan tidak bersifat acak, melainkan strategis dan berorientasi pada kedalaman analisis.

Dalam proses pengumpulan data, penelitian juga dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan Forum Grup Discussion dengan para ahli. Para ahli ini merupakan bagian dari pengambilan data terhadap perkembangan kebijakan yang terbaru untuk memahami perubahan posisi dan strategi Indonesia secara temporal. Pendekatan kronologis ini penting dalam penelitian kebijakan karena memungkinkan identifikasi momen kritis (*critical junctures*) yang mempengaruhi arah kebijakan (George & Bennett, 2005). Dengan demikian, pengumpulan data tidak hanya bersifat kompilatif, tetapi juga analitis, karena diarahkan untuk mendukung proses *process tracing* pada tahap analisis.

Penelitian dengan penggunaan wawancara semi-terstruktur dan FGD diharapkan mampu memperoleh data secara mendalam dari informan. Wawancara yang digunakan dapat bersifat semi struktur yang bersifat fleksibel, di mana peneliti merancang pertanyaan terlebih dahulu tetapi memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan selama proses pengambilan data berlangsung. Adapun informan yang akan dijadikan narasumber pada wawancara dan FGD adalah sebagai berikut:

1. Pemerhati Nuklir dan Geopolitik
2. Diplomat/ Mantan Diplomat
3. Akademisi Hubungan internasional dan Geopolitik
4. Pemerhati Keamanan

Metode wawancara dan FGD ini diharapkan juga mampu digunakan sebagai sumber data analitis yang memberikan konteks terhadap dinamika regional dan sistem internasional dan melakukan triangulasi data. Melalui triangulasi tersebut, penelitian berupaya meminimalkan bias dan meningkatkan

reliabilitas temuan dalam konteks penelitian kebijakan yang sensitif secara strategis.

Dengan kombinasi studi dokumentasi, wawancara dan Forum Grup Discussion, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memberikan landasan empiris yang kuat untuk menganalisis secara komprehensif dampak proliferasi nuklir dalam konteks GPC serta implikasinya terhadap kebijakan keamanan dan diplomasi Indonesia.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif–analitis yang bertujuan mengidentifikasi pola kebijakan, dinamika kausal, serta relasi antara eskalasi *Great Power Competition* (GPC), proliferasi nuklir, dan respons strategis Indonesia. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti membaca data secara sistematis, kontekstual, dan teoritis dalam kerangka studi keamanan internasional dan analisis kebijakan. Dalam penelitian kebijakan, analisis kualitatif tidak hanya berfungsi untuk menggambarkan fenomena, tetapi juga untuk menjelaskan mekanisme yang menghubungkan struktur internasional dengan keputusan nasional (George & Bennett, 2005; Creswell, 2014).

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap utama. Pertama, organisasi dan reduksi data, yaitu penyaringan serta pengelompokan dokumen berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian dan model konseptual yang telah dirumuskan. Pada tahap ini, data diklasifikasikan berdasarkan konteks waktu (2017–2025), dinamika regional Indo-Pasifik, serta jenis kebijakan yang dianalisis (pertahanan, diplomasi, dan stabilitas kawasan). Reduksi data dilakukan untuk memastikan bahwa analisis tetap terarah pada hubungan antara GPC, proliferasi nuklir, dan kebijakan Indonesia, sebagaimana dianjurkan dalam teknik analisis kualitatif sistematis (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Kedua, pengodean analitis (*analytical coding*), yaitu penetapan kategori tematik yang diturunkan dari kerangka teori dan variabel konseptual penelitian. Kategori tersebut meliputi dinamika struktur sistem internasional, manifestasi *security dilemma*, konstruksi ancaman dalam kebijakan, serta bentuk penyesuaian strategi Indonesia sebagai negara menengah. Pengodean dilakukan secara fleksibel dan terbuka, sehingga memungkinkan munculnya pola baru yang tidak sepenuhnya diprediksi dalam kerangka awal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip analisis tematik dalam penelitian kualitatif yang menekankan keterbukaan terhadap dinamika data (Miles et al., 2014).

Ketiga, analisis kausal dan relasional, yaitu menelaah keterkaitan antar-tema untuk memahami bagaimana tekanan struktural sistem internasional diterjemahkan menjadi kebijakan nasional. Pada tahap ini digunakan logika *process tracing* untuk mengidentifikasi mekanisme yang menghubungkan eskalasi GPC dengan perubahan orientasi kebijakan Indonesia (George & Bennett, 2005). Analisis tidak berhenti pada deskripsi perkembangan kebijakan,

tetapi diarahkan pada penjelasan mengenai bagaimana dan mengapa kebijakan tersebut terbentuk dalam konteks proliferasi nuklir dan dinamika regional.

Keempat, analisis kebijakan substantif, yaitu evaluasi terhadap orientasi, konsistensi, dan implikasi kebijakan Indonesia dalam menghadapi tekanan proliferasi nuklir. Tahap ini mengacu pada kerangka analisis kebijakan yang menekankan identifikasi masalah, respons kebijakan, serta konsekuensi strategisnya (Dunn, 2018). Dengan pendekatan ini, analisis tidak hanya menjelaskan hubungan struktural, tetapi juga menilai relevansi dan efektivitas kebijakan dalam menjaga kepentingan nasional.

Hasil analisis kemudian disintesiskan secara konseptual dengan mengaitkan temuan empiris dan kerangka teori keamanan internasional, termasuk neorealisme struktural, *security dilemma*, dan perspektif *middle power diplomacy*. Sintesis ini bertujuan menghasilkan pemahaman yang koheren, argumentatif, dan berbasis bukti mengenai posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika proliferasi nuklir di Indo-Pasifik. Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga eksplanatif dan normatif dalam konteks pengembangan rekomendasi kebijakan.

3.6 Analisis Intelijen

Analisis intelijen memiliki peran sentral dalam mengolah temuan penelitian mengenai dampak proliferasi nuklir militer di kawasan Indo-Pasifik akibat eskalasi *great power competition* menjadi pengetahuan strategis yang relevan bagi pembuat kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, analisis intelijen diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana perubahan distribusi kekuatan global, modernisasi postur nuklir, pembentukan aliansi strategis seperti AUKUS, serta dinamika *security dilemma* regional berimplikasi terhadap kepentingan nasional Indonesia. Dengan demikian, analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi berorientasi pada identifikasi ancaman strategis dan penyusunan respons kebijakan yang adaptif.

Sugirman (2009) menyebutkan bahwa karakteristik analisis intelijen mencakup kecermatan dalam pemberian *judgement*, ketajaman dan akurasi dalam menyodorkan *forecasting*, serta proporsionalitas dalam merumuskan *early warning*. Dalam penelitian ini, *judgement* dimaknai sebagai proses penilaian terhadap dinamika eskalasi rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok, modernisasi dan proliferasi nuklir di Indo-Pasifik, serta potensi implikasinya terhadap stabilitas kawasan dan posisi Indonesia sebagai negara non-nuklir. Ketepatan dalam menyusun *judgement* menjadi krusial agar proliferasi nuklir tidak dipahami semata sebagai isu normatif non-proliferasi, tetapi sebagai ancaman intelijen strategis yang memiliki dimensi militer, geopolitik, dan kebijakan pertahanan.

Setelah tahap *judgement*, analisis intelijen menuntut kemampuan melakukan *forecasting*. Hyndman dan Athanasopoulos (2018) mendefinisikan *forecasting* sebagai prediksi masa depan seakurat mungkin berdasarkan seluruh informasi yang tersedia, termasuk data historis dan kemungkinan kejadian

mendatang. Dalam konteks penelitian ini, *forecasting* diarahkan pada proyeksi perkembangan kompetisi kekuatan besar, potensi eskalasi di titik rawan seperti Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan, serta kemungkinan proliferasi nuklir laten akibat transfer teknologi dan modernisasi militer. *Forecasting* intelijen berfungsi mengurangi ketidakpastian strategis sehingga pembuat kebijakan Indonesia dapat merumuskan langkah diplomasi, pertahanan, dan penguatan kapasitas nasional secara lebih terukur.

Tahapan paling strategis dalam analisis intelijen adalah perumusan *early warning*. Dalam penelitian ini, *early warning* dimaknai sebagai penyajian gambaran komprehensif mengenai implikasi risiko proliferasi nuklir militer terhadap kepentingan nasional Indonesia, termasuk potensi destabilisasi jalur laut strategis, tekanan terhadap norma SEANWFZ, peningkatan risiko eskalasi konflik kawasan, serta kemungkinan terjadinya *spillover effect* terhadap keamanan maritim dan politik luar negeri bebas-aktif Indonesia. *Early warning* yang proporsional akan memberikan dasar bagi penguatan sistem deteksi dini, peningkatan *strategic foresight*, dan penyusunan respons kebijakan nasional yang berbasis bukti.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, analisis intelijen dalam penelitian ini merujuk pada peran, tujuan, dan fungsi intelijen sebagaimana diamanatkan dalam peraturan tersebut. Intelijen memiliki lima peran utama: deteksi, peringatan dini, pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman. Dalam konteks proliferasi nuklir di Indo-Pasifik, kelima peran tersebut diterjemahkan sebagai berikut:

- a. Deteksi, melalui identifikasi indikator eskalasi GPC dan proliferasi nuklir militer yang berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan.
- b. Peringatan dini, melalui penyusunan analisis risiko strategis terhadap implikasi kebijakan dan keamanan nasional Indonesia.
- c. Pencegahan dan penangkalan, melalui rekomendasi kebijakan yang memperkuat diplomasi multilateral, norma kawasan, serta kapasitas pertahanan nasional.
- d. Penanggulangan, melalui penyusunan opsi respons strategis apabila terjadi eskalasi konflik atau perubahan signifikan dalam postur nuklir kawasan.

Pelaksanaan peran tersebut dijalankan melalui tiga fungsi intelijen, yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan, dengan tujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen guna memberikan *early warning* terhadap berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman, baik potensial maupun nyata, yang dapat memengaruhi keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara.

Dengan demikian, analisis intelijen dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemetaan dinamika proliferasi nuklir kawasan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kesiapan Indonesia menghadapi tekanan struktural global melalui sistem deteksi dini, mitigasi risiko,

dan perumusan respons kebijakan keamanan nasional yang adaptif dan berorientasi jangka panjang.

3.7 Proses Penafsiran dan Penyimpulan Hasil Penelitian

Penafsiran hasil penelitian dilakukan melalui pendekatan interpretatif-analitis dengan menempatkan temuan empiris dalam dialog langsung dengan kerangka konseptual dan landasan teoretis yang telah dibahas pada Bab II. Penafsiran tidak diarahkan untuk menilai benar dan salah suatu kebijakan negara, melainkan untuk memahami pola, mekanisme kausal, serta implikasi strategis yang membentuk respons Indonesia terhadap proliferasi nuklir dalam konteks eskalasi *Great Power Competition* (GPC). Dengan demikian, fokus utama penafsiran adalah menjelaskan bagaimana tekanan struktural sistem internasional diterjemahkan ke dalam keputusan kebijakan nasional.

Proses penafsiran dilakukan secara iteratif dan reflektif, di mana peneliti secara berulang mengaitkan temuan empiris dengan konsep neorealisme struktural, *security dilemma*, sekuritisasi, serta strategi *middle power diplomacy*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti membaca data bukan sebagai fakta yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari proses sosial dan politik yang saling terhubung (Denzin & Lincoln, 2018). Dalam konteks ini, perubahan kebijakan Indonesia dipahami sebagai respons terhadap interaksi antara distribusi kekuatan global, persepsi ancaman regional, dan kepentingan nasional yang dinegosiasikan dalam ruang kebijakan.

Penafsiran juga mempertimbangkan konteks struktural dan temporal yang melingkupi data. Dinamika proliferasi nuklir dan GPC dianalisis dalam kerangka sistem internasional yang anarkis sebagaimana dijelaskan oleh Waltz (1979), sekaligus dalam konteks konstruksi ancaman melalui praktik politik dan diplomasi (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Dengan demikian, makna kebijakan tidak dianggap universal atau statis, melainkan terikat pada relasi kuasa, kepentingan strategis, serta kondisi regional Indo-Pasifik pada periode 2017–2025.

Dalam tahap ini, peneliti juga menggunakan logika *process tracing* untuk memastikan bahwa hubungan antara eskalasi GPC, proliferasi nuklir, dan kebijakan Indonesia dapat dijelaskan melalui mekanisme yang konsisten dan berbasis bukti (George & Bennett, 2005). Penafsiran tidak berhenti pada korelasi temporal, tetapi diarahkan pada identifikasi momen kritis (*critical junctures*), perubahan orientasi kebijakan, serta rasionalitas strategis yang melatarbelakangi keputusan negara.

Penyimpulan hasil penelitian dilakukan secara analitis-konseptual, bukan melalui generalisasi statistik. Kesimpulan disusun dengan merangkum pola utama yang muncul dari analisis, kemudian mengaitkannya dengan kerangka teori keamanan internasional dan analisis kebijakan publik. Pendekatan ini mengikuti prinsip *analytical generalization* dalam studi kasus, di mana temuan digunakan untuk memperkuat atau memperluas relevansi teori dalam konteks empiris tertentu (Yin, 2018).

Selain itu, proses penyimpulan juga menekankan implikasi normatif dan strategis bagi kebijakan Indonesia. Dengan mengintegrasikan temuan empiris dan kerangka teori, penelitian ini menghasilkan rekomendasi berbasis bukti (*evidence-informed policy insights*) yang relevan bagi penguatan strategi diplomasi dan pertahanan nasional (Dunn, 2018). Penyimpulan tidak hanya merangkum hasil, tetapi juga mengidentifikasi ruang kebijakan yang dapat diperkuat dalam menghadapi dinamika proliferasi dan rivalitas kekuatan besar.

Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman konseptual yang utuh mengenai posisi Indonesia dalam sistem internasional yang sedang mengalami transformasi, sekaligus menawarkan kontribusi akademik dan strategis dalam pengembangan studi keamanan dan kebijakan luar negeri Indonesia. Proses penafsiran dan penyimpulan dirancang untuk menjaga keseimbangan antara ketajaman analitis, konsistensi teoretis, dan relevansi kebijakan, tanpa mengabaikan kompleksitas dinamika keamanan global yang terus berkembang.

3.8 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan lokasi di wilayah Jabodetabek. Kegiatan penelitian akan dilaksanakan selama kurun waktu 8 bulan, seperti yang tertera pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																																			
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		Minggu	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Studi Literatur																																				
2	Koordinasi dengan <i>stakeholder</i>																																				
3	Pengambilan data																																				
4	Analisis Data																																				
5	Interpretasi dan Pelaporan																																				
6	Penulisan <i>Draft Manuscript</i>																																				
7	<i>Submit</i> artikel ke Jurnal																																				

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2014). *The end of American world order*. Polity Press.
- Almela, M. H. (2025): The nuclear panorama in the Indo-Pacific: a region in constant turmoil, **3**, 1–34.
- Anggitta, N. (2017). ASEAN's role in shaping nuclear security future in the region. *Journal of ASEAN Studies*, 4(2). <https://doi.org/10.21512/JAS.V4I2.1950>.
- Arum, S. P., Ramadhani, A. F., & Saputra, R. A. (2024). Era pertahanan laut baru di Indo-Pasifik melalui kerjasama keamanan AUKUS sebagai respons terhadap kekuatan dominasi China. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(2). <https://doi.org/10.54082/jupin.463>.
- Auslin, M. R., and Geopolitics, N. (2021): S © 2021, (November 2020), 200–203. <https://doi.org/10.1016/j.orbis.2020.11.011>.
- Baghel, R., and Nüsser, M. (2015): Securing the heights : The vertical dimension of the Siachen conflict between India and Pakistan in the Eastern Karakoram, *Political Geography*, 48, 24–36. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2015.05.001>.
- Balzacq, T. (2011). *Securitization theory: How security problems emerge and dissolve*. Routledge.
- Barua, A., Baruah, T., and Vij, S. (2025): Game theoretical analysis of China-India interactions in the Brahmaputra River Basin, *Journal of Hydrology*, 652(December 2024), 132602. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.132602>.
- Booth, K., & Wheeler, N. J. (2008). *The security dilemma: Fear, cooperation, and trust in world politics*. Palgrave Macmillan.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Bowers, I. (2022). Counterforce dilemmas and the risk of nuclear war in East Asia. *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, 5(1), 151–179. <https://doi.org/10.1080/25751654.2022.2064153>.
- Brodie, B. (Ed.). (1946). *The absolute weapon: Atomic power and world order*. Harcourt, Brace and Company.
- Buzan, B. (1983). *People, states and fear: The national security problem in international relations*. Wheatsheaf Books.

- Buzan, B. (1991). *People, states and fear: An agenda for international security studies in the post-Cold War era* (2nd ed.). Harvester Wheatsheaf.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Buzan, B., & Wæver, O. (2003). *Regions and powers: The structure of international security*. Cambridge University Press.
- Caballero-Anthony, M., Chng, B., & Haywood, S. (2022). Examining Southeast Asia's diplomacy on nuclear disarmament and nuclear security: Shared norms and a regional agenda. *Asian Journal of Peacebuilding*, 10(2), 233–258. <https://doi.org/10.18588/202209.00a254>
- Chen, X., Zhang, X., and Xu, Q. (2024): The implications of the Indo-Pacific.
- Cheng, D. (2022). AUKUS: The changing dynamic and its regional implications. *European Journal of Development Studies*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2022.2.1.63>.
- Christensen, T. J. (1999). China, the U.S.-Japan alliance, and the security dilemma in East Asia. *International Security*, 23(4), 49–80.
- Connelly, A. L., Fong, J., & Syailendra, E. A. (2017). *Southeast Asian perspectives on US-China competition*. Lowy Institute.
- Cooper, A. F. (1997). *Niche diplomacy: Middle powers after the Cold War*. Macmillan Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dai, W. (2025): Belt and Road Initiative : Driving innovation in tech enterprises through global value chains, *Finance Research Letters*, 74(September 2024), 106796. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.106796>.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Ding, Y. (2023). An exploration of the AUKUS trilateral partnership. *Studies in Social Science Research*, 4(1), 90–95. <https://doi.org/10.22158/sssr.v4n1p90>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.

- Edwina, Y. A., Yogyakarta, U. M., and Yogyakarta, U. M. (2025): The Potential Escalation of Strategic Partnership Conflicts in the Indo-Pacific Region from the AUKUS Trilateral Defense Pact PARTNERSHIP CONFLICTS IN THE INDO-PACIFIC, 22(2). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol22.2.1650>
- Elok, S., Darmawan, W. B., & Sudirman, A. (2025). Indonesia's diplomatic challenges in responding to nuclear-based military modernization plans in the Indo-Pacific region. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 5(3), 1–14. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i3.660>
- Fraser, B. J., and Soliman, M. (2023): The Quad, AUKUS, and I2U2 formats: Major lessons from minilaterals, *Orbis*, 67(3), 411–419. <https://doi.org/10.1016/j.orbis.2023.06.005>.
- George, A. L., & Bennett, A. (2005). *Case studies and theory development in the social sciences*. MIT Press.
- Glaser, C. L. (1997). The security dilemma revisited. *World Politics*, 50(1), 171–201.
- Goh, E. (2005). Meeting the China challenge: The U.S. in Southeast Asian regional security strategies. *Policy Studies*, 16, 1–35.
- Guilfoyle, D., Sing, E., and Chan, Y. (2022): Lawships or warships ? Coast guards as agents of (in) stability in the Pacific and South and East China Sea, *Marine Policy*, 140(April), 105048. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105048>.
- Hanumbhawono, A., Perwita, A. A. B., & Yusgiantoro, P. (2022). Policies and scenarios to prevent the use of nuclear weapons between United States and China in the South China Sea. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.33172/jp.v8i1.1653>.
- Herz, J. H. (1950). Idealist internationalism and the security dilemma. *World Politics*, 2(2), 157–180.
- Hiim, H. S. (2024). The last atomic Waltz: China's nuclear expansion and the persisting relevance of the theory of the nuclear revolution. *Contemporary Security Policy*, 45(2), 195–223. <https://doi.org/10.1080/13523260.2023.2291258>.
- Huang, G., Wu, S., and Chen, L. (2025): The belt and road initiative , outward foreign direct investment , and technological innovation, 77(October 2024).
- Hynd, A. M. (2024). Dirty, dangerous... and difficult? Regional perspectives on a nuclear South Korea. *The Journal of Asian Security & International Affairs*, 11(3), 285–310. <https://doi.org/10.1177/23477970241298756>.

- Jervis, R. (1978). Cooperation under the security dilemma. *World Politics*, 30(2), 167–214.
- Kang, D. C. (2003). Getting Asia wrong: The need for new analytical frameworks. *International Security*, 27(4), 57–85.
- Khan, F. H., Tarapore, A., & Panda, A. (2024). Integrated deterrence in the Asia-Pacific: Exploring medium power strategic autonomy. *Journal of Strategic Security and Asymmetric Warfare*, 9(2), 274–298. <https://doi.org/10.57169/jssa.009.02.0274>.
- Kraft, H. J. S. (2017). Great power dynamics and the waning of ASEAN centrality in regional security. *Asian Politics & Policy*, 9(4), 597–612. <https://doi.org/10.1111/ASPP.12350>.
- Kunkunrat, A. (2022). The Asia-Pacific stage: The big role and geopolitical challenges. *Jurnal Sosial Sains*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.58471/ju-sosak.v1i01.326>.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Martin, A., & Safitri, D. A. (2025). Ancaman keamanan Indo-Pasifik terhadap keputusan Australia membangun kapal selam tenaga nuklir tahun 2021. *Sosio Dialektika*, 9(2), 1–15. <https://doi.org/10.31942/sd.v9i2.12852>.
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The tragedy of great power politics*. W. W. Norton & Company.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mohan, C. R. (2023). Nuclear security architecture of South Asia. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8282966>.
- Nurfauzi, A., Lampita, F., & Mahendra, M. R. (2022). The impact of AUKUS in Indonesian perspective: Regional military balance and security dilemma. *Sentris: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 3(2), 90–103. <https://doi.org/10.26593/sentris.v3i2.6079.90-103>.
- Okcavia, I. (2022). Strategi pertahanan Indonesia menghadapi aliansi AUKUS di kondisi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity & Ambiguity). *Jurnal Defendonesia*, 6(2), 1–15. <https://doi.org/10.54755/defendonesia.v6i2.118>.
- Organski, A. F. K. (1958). *World politics*. Alfred A. Knopf.
- Partnership for Maritime Domain Awareness (IPMDA) in the South China Sea : A Chinese perspective, 167(June). <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106247>

- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Poon, J. P. H., Peng, P., Qian, X., and Yang, Y. (2024): End of the Asia-Pacific : Geoeconomics , belt and road and the Indo-Pacific ☆, *Political Geography*, 108(April 2023), 103026. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2023.103026>.
- Qiao-Franco, E. (2023). ASEAN as a norm entrepreneur in international cooperation on nuclear non-proliferation: Bases, pathways, and challenges. In *ASEAN and regional order: Revisiting security community in Southeast Asia*(pp. 213–238). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25009-5_10.
- Schwandt, T. A. (2014). *The SAGE dictionary of qualitative inquiry* (4th ed.). SAGE Publications.
- Reva, D. (2023). Nuclear danger in Asia: Arms races or stability? In *Shaping smart and health ageing* (pp. 197–212). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-24896-2_14.
- Sariguna, P., Kennedy, J., and Sutrasna, Y. (2021): INDONESIA ' S POLICY ANALYSIS OF THE AUKUS TRILATERAL, 278–286.
- Schelling, T. C. (1960). *The strategy of conflict*. Harvard University Press.
- Schelling, T. C. (1966). *Arms and influence*. Yale University Press.
- Schweller, R. L. (1994). Bandwagoning for profit: Bringing the revisionist state back in. *International Security*, 19(1), 72–107.
- Steff, R. (2024). The US-China great power competition in the Indo-Pacific: Colliding strategies and ambitions. In *Global political transitions* (pp. 95–120). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-96-0282-7_5
- Sukin, L., Sagan, S. D., & Suh, J. J. (2024). East Asia's alliance dilemma: Public perceptions of the competing risks of extended nuclear deterrence. *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, 7(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/25751654.2024.2358596>.
- Trnavac, R., and Hidalgo, E. (2024): Breach of pacta sunt servanda : A corpus-assisted analysis of newspaper discourse on the AUKUS agreement, *Applied Corpus Linguistics*, 4(3), 100108. <https://doi.org/10.1016/j.acorp.2024.100108>.
- Utami, S. T. (2022). Keamanan regional Asia Tenggara dan implementasi terhadap ketahanan wilayah Indonesia pasca perjanjian AUKUS. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(3), 377–398. <https://doi.org/10.22146/jkn.75593>.

- Walt, S. M. (1987). *The origins of alliances*. Cornell University Press.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. Addison-Wesley.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yuan, J., Suh, J. J., & Glaser, C. L. (2020). Nuclear learning and US–China strategic stability in Asia. *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, 3(Supplement 1), 1–23. <https://doi.org/10.1007/S42533-020-00064-6>.
- Zafra-Gómez, J. L. (2022). US nuclear strategy in the Indo-Pacific (1945–2021). In *Routledge handbook of US foreign policy in the Indo-Pacific* (pp. 1–16). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003018322-34>

LAMPIRAN II
BIODATA TIM PENELI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rika Wijiyanti
NIP/NIK : 199211102022032007 / 3516185011920001
Golongan : IIIb
NIDN : 5110119201
Jabatan Fungsional : Lektor
Tempat & Tanggal Lahir : Mojokerto, 10 Nopember 1992
Jenis Kelamin : Wanita
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Mukodi No. 1 Babakan Madang, Sentul, Bogor
Nomor Telepon : 0251 - 8271478
Alamat Rumah : Perum Greenland Forest Hill Residence Blok G9/9, Kel.
Semplak Barat, Kec. Kemang, Kab. Bogor
Nomor Telepon Genggam : 081333537503
Alamat e-mail : rika.wijiyanti@stin.ac.id/wijiyantirika@gmail.com
H-index Scopus : 11
H-index Google Scholar : 11

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI			
Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi
2019	Doktor	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Kimia
2016	Magister	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Kimia

2015	Sarjana	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Kimia
------	---------	--	-------

PELATIHAN PROFESIONAL/KEILMUAN/KEAHLIAN				
Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara / Penerbit Sertifikat	Sertifikat	Jangka Waktu
2026	AMOS dalam Riset Kuantitatif (Dalam Negeri)	Litera Academia	Ada	15 – 16 Januari
2025	<i>Applied Approach</i> (Dalam Negeri)	Universitas Jenderal Soedirman	Ada	8 – 10 Desember
2025	Workshop Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Laboratorium Nuklir dan Virtual Kimikal STIN (Dalam Negeri)	STIN/ FMIPA UI	Ada	28 – 29 Agustus
2025	Training MALDI TOF MS (Dalam Negeri)	STIN/ PT. Ditek Jaya	Ada	25 – 27 Agustus
2025	Training Instrumen High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	STIN/ PT. Ditek Jaya	Ada	19 – 21 Agustus
2024	Webinar Olah Data Kuantitatif dari SPSS & SmartPLS dengan AI (Dalam Negeri)	PT Ebiz Prima Nusa	Ada	26 – 27 November
2024	Webinar Penelitian Kualitatif dengan Aplikasi Nvivo dan Tools AI (Dalam Negeri)	PT Ebiz Prima Nusa	Ada	11 – 12 Juni
2022	Pendidikan Dasar Intelijen (Dalam Negeri)	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Intelijen Negara	Ada	15 Agustus – 15 November
2021	Booth Camp and Coaching Clinic on Scientific Writing (Dalam Negeri)	Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan Rumah Publikasi Indonesia (RPI Institute)	Ada	29 – 30 November

2021	Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) (Dalam Negeri)	Universitas Jenderal Soedirman	Ada	24 – 27 Mei
2021	Certified Training Management Professional (Dalam Negeri)	MKI Consulting	Ada	29 Maret - 5 April
2018	Specialized Workshop on Membrane Theory, Manufacturing and Applications (Luar Negeri)	Advanced Membrane Technology Research Centre (AMTEC)	Ada	29 Oktober
2018	UTM Internship / Research Attachment (Luar Negeri)	Kemenristekdik ti- Universiti Teknologi Malaysia	Ada	5 September – 10 Desember
2017	International Workshop on Materials, Membranes, Energy and Water Management (Dalam Negeri)	Fakultas Teknik – Universitas Lambung Mangkurat	Ada	6 - 8 Desember
2016	Workshop on Inorganic Material for Catalysis and Separation Processes (Dalam Negeri)	Departemen Kimia Universitas Diponegoro- Universiti Teknologi Mara- The University of Queensland	Ada	7 Desember

2016	Course on Microporous Materials and Their Application in Catalysis and Separation (Dalam Negeri)	Departemen Kimia Universitas Diponegoro-Universiti Teknologi Mara- The University of Queensland	Ada	8 - 9 Desember
2016	Workshop Transmission Electron Microscope (TEM) (Dalam Negeri)	Puspitek LIPI, Serpong	Ada	6 – 7 Oktober

PUBLIKASI KARYA ILMIAH		
A. Buku/Bab Buku/Jurnal		
Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2026	Post-treatment of Polysulfone/Zeolite Templated Carbon Mixed Matrix Membranes by Heating and Surface Coating for Enhanced Gas Separation Performance	Walter de Gruyter GmbH / Journal of Polymer Engineering
2025	The Role of Intelligence in Navigating Indonesia's B40 Biodiesel Policy	Journal of Law, Politic and Humanities
2025	Three decades of development and low-cost laboratory research overview	AIP Conference Proceedings
2025	Characterization and Health Risk of PM _{2.5} Exposure in South Tangerang, Indonesia	ACS Earth and Space Chemistry
2024	Vulnerability Analysis of Mobile JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) to Prevent Cyber Attacks	IEEE Conference Proceedings
2024	Cybersecurity Vulnerabilities in Smartwatches as Health Devices using Multi-Factor Authentication (MFA)	IEEE Conference Proceedings
2024	Investigating Hydrocarbon Gases Permeability Through Hollow Fiber Hybrid Carbon Membrane	Journal of Applied Membrane Science & Technology

2023	Evaluation of different carbon-modified zeolite derivatives preparation methods as a filler in mixed matrix membrane on their gas separation performance	Elsevier / Microporous and Mesoporous Materials
2023	Cybersecurity Detection Using Neural Networks for Chemical Industry	IEEE Conference Proceedings
2023	In-situ growth of zeolite-A in the fiber surface for methane adsorption	EDP Sciences / E3S Web of Conferences
2023	Risk Potency of Lead Exposure to Decrease Cognitive Ability of Productive Age Community in Indonesia Emas 2045	Universitas Islam Indoensia / EKSAKTA : Journal of Science and Data Analysis
2022	Integration of Government Regulations to Anticipate the Threat of Terrorism with Radioactive and Nuclear Technology	IEEE
2022	N ₂ /CH ₄ separation behavior at elevated temperature on P84 hollow fiber carbon membrane	Elsevier / Materials Today: Proceedings
2022	Elevated H ₂ /N ₂ Separation Performance by Annealing Post-Treatment of Polysulfone Hollow Fiber Membrane	Rasayan Journal / Rasayan Journal Chemistry
2021	Annealing and TMOS coating on PSF/ZTC mixed matrix membrane for enhanced CO ₂ /CH ₄ and H ₂ /CH ₄ separation	The Royal Society / Royal Society Open Science
2021	Improvement N ₂ /SF ₆ separation performance on P84 derived carbon membrane by incorporating of zeolite-carbon composite	American Institute of Physics / AIP Conference Proceedings
2021	Annealing treatment for enhancing of H ₂ /C ₃ H ₈ separation performance on polysulfone membrane	American Institute of Physics / AIP Conference Proceedings
2021	CO ₂ gas separation using mixed matrix membranes based on polyethersulfone/MIL-100(Al)	John Wiley and Sons Inc. / Open Chemistry
2021	Novel mixed matrix membranes based on polyethersulfone and MIL-96 (Al) for CO ₂ gas separation	Springer International Publishing AG / Chemical Papers

2021	Development of a P84/ZCC Composite Carbon Membrane for Gas Separation of H ₂ /CO ₂ and H ₂ /CH ₄	American Chemical Society / ACS Omega
2020	Prospect of nanocomposite membranes for natural gas treatment	(Book Chapter) Elsevier Science & Technology / Micro and Nano Technologies
2020	Enhanced gas separation performance of polysulfone membrane by incorporation of zeolite templated carbon	UTM Press / Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences
2020	Hydrogen adsorption characteristics for zeolite-Y templated carbon	Gadjah Mada University / Indonesian Journal of Chemistry
2019	Fabrication of Mixed Matrix Membrane Polysulfone – Zeolite Carbon Composites (ZCC) For Gas Separation	IOP Publishing Ltd. / IOP Conference Series Materials Science and Engineering
2019	Zeolite templated carbon : preparation, characterization and performance as filler material in co-polyimide membranes for CO ₂ /CH ₄ separation	UTM Press / Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences
2019	P84/Zeolite-Carbon Composite Mixed Matrix Membrane for CO ₂ /CH ₄ Separation	Gadjah Mada University / Indonesian Journal of Chemistry
2019	Polysulfone mixed matrix hollow fiber membranes using zeolite templated carbon as a performance enhancement filler for gas separation	Institution of Chemical Engineers / Chemical Engineering Research and Design
2018	Adsorption-Desorption of CO ₂ on Zeolite-Y Templated Carbon at Various Temperature	Royal Society of Chemistry / RSC Advances

B. Makalah/Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara
2025	Enhancing gas separation performance in PSF/ZTC mixed matrix membranes through heat treatment	IUPAC 2025
2018	Preparation, characterization and performance of zeolite templated carbon as filler in polysulfone membrane	Membrane Society of Australasia (Aseanian Membrane Society 11)

2018	Enhanced gas separation performance of polysulfone membrane by incorporation of zeolite templated carbon	Advanced Membrane Technology Research Centre, Universiti Teknologi Malaysia (National Congress on Membrane Technology)
2017	Enhancement gas separation through mixed matrix membranes (MMM) using zeolite templated carbon as filler	Kokushikan University, Tokyo (6th International Conference on Engineering)
2017	Adsorption-desorption of hydrogen on zeolite-Y templated carbon materials at various of temperature	The University of Tokyo dan Institut Teknologi Bandung (3 rd Euro-Asia Zeolite Conference)

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM			
Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ Peserta/Pembicara
2025	Seminar Nasional Program Pascasarjana STIN	Sekolah Tinggi Intelijen Negara	Panitia
2023	International Seminar "Biotechnology : Agriculture, Health, Industry, and Soil & Environment)	Program Studi Bioteknologi IPB	Peserta
2020	Dialog Nasional NawaCita – Energi Nuklir untuk Pembangunan Nasional	Lembaga Kajian Nawacita	Peserta

PENGALAMAN		
Tahun	Kegiatan enghargaan	Penyelenggara
2026	Reviewer Biodemography and Social Biology	Taylor and Francis Ltd.
2025	Reviewer Environmental Science & Technology Journal	American Chemical Society
2024	Reviewer International Journal of Eco-Innovation in Science and Engineering	UPN Veteran Jawa Timur

2024	Reviewer Prosiding Konferensi Internasional (Jurnal IOP Conference Series : Earth and Environmental Science / IOP-EES)	8 th International Conference on Science and Technology Engineering Faculty UPN Veteran Jawa Timur
------	--	---

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Bogor, 11 Februari 2026
Yang Menyatakan,



Rika Wijiyanti

RESUME

AISHA RASYIDILA KUSUMASOMANTRI

Aisha Rasyidila Kusumasomantri (Aira) is a scholar in international security studies with a focus on military and strategic affairs, brings expertise in Indo-Pacific strategic studies, modern warfare, and international intelligence. Her foundation lies in an undergraduate degree in International Relations from Universitas Indonesia and a postgraduate degree in Global Security from the University of Glasgow. Currently, she plays a pivotal role in shaping the next generation of intelligence professionals as a lecturer at the State Intelligence College. Ms. Kusumasomantri's career is marked by extensive collaboration with key government agencies like the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Development and Planning, and the Ministry of Defence, where her contributions significantly impacted the formulation of Indonesia's security policies. Beyond academia, Ms. Kusumasomantri actively engages in contemporary discourse on defence and security. She provides insightful commentary, expert analysis, and critical perspectives through various publications and media outlets. Additionally, her association with ISI as the Co-Director of Cooperation and External Engagement established her understanding of crucial topics, including the dynamics of the Indo-Pacific region and the evolution of modern military capabilities.



A. EDUCATION

Program	High School (Diploma) Hon	Undergraduate Bachelor of Social Science (B. Soc.Sc) Hon	Postgraduate Master of Science (M.Sc.) Merit
Institution	Labschool Jakarta High School	University of Indonesia	University of Glasgow

Programme	Social Sciences Studies	Hubungan Internasional (International Relations)	Global Security
Enrolment Year	2007-2010	2010-2014	2015-2016
Title of Final Assignment /Theses/Dissertation	East Timor Under Indonesian Government Rule (1976-1991)	Indonesian Hedging Strategy towards China's Territorial Claim on the South China Sea	Indonesian Counterinsurgency Practices: Comparative Studies of the New Order and Reformation Era Governments
Name of Supervisor/Promotor	Agus Munandar, S.Pd.	Edy Prasetyono, Ph. D	Prof. Peter Jackson

C. WORKING EXPERIENCE* (redacted)

*Some positions are conducted concurrently

No.	Year	Title	Institution	Post
6.	October 2017 - April 2022	Lecturer	International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia	Depok, Indonesia
7.	June 2017 – November 2017	Head of Dean's Secretariat	Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia	Depok, Indonesia
8.	March 2017 – 2020	Expert Staff	The National Planning and Development Agency, Republic of Indonesia	Jakarta, Indonesia
9.	March 2019 – 2020	Managing Editor of ASEAN Insights	ASEAN Study Center Universitas Indonesia	Depok, Indonesia
10.	April 2022 - Present	Lecturer	The State Intelligence College	Bogor, Indonesia
11.	July 2022 – December 2023	Secretary of the Intelligence Studies Master's Programme	The State Intelligence College	Bogor, Indonesia

12.	March 2024 – February 2025	Director of Research	Indo Pacific Strategic Intelligence	Jakarta, Indonesia
13.	February 2025-present	Co-Director of Cooperation and External Engagement	Indo Pacific Strategic Intelligence	Jakarta, Indonesia

D. RECENT PUBLICATIONS* (redacted)

No.	Year	Title	Publisher
1.	2016	Indonesian Hedging Strategy in the South China Sea	Global Journal of International Politics (Journal Article)
2.	2016	<i>Konflik dan Kerjasama di Kutub Utara dalam Perspektif Indonesia</i> (Conflict and Cooperation in the North Pole from Indonesian Perspective)	Raja Grafindo Persada Publisher (Book Chapter)
3.	2019	The Christchurch Shooting and Definitional Problem of Terrorism	Modern Diplomacy EU (Opinion Piece)
4.	2019	The Heart and Minds Strategy in Papua	Katadata (Opinion Piece)
5.	2020	Rethinking the Indonesian Infrastructure Approach in Papua	The Jakarta Post (Opinion Piece)
6.	2020	Reassessing the Indonesian Government's Decision to Reject ISIS Foreign Terrorist Fighters	Harakatuna (Opinion Piece)
7.	2020	Assessing the Expectation and Limitation of the ASEAN-EU Counterterrorism Cooperation	Journal of ASEAN Studies (Journal Article)
8.	2020	Human Security in Counterterrorism: When More than Rhetoric is Critically Needed	IR-UI Commentaries (Commentary)
9.	2020	Reaffirming the Importance of "The People" for ASEAN Political Security Community	ASEAN Insights (Commentary)
10.	2021	Don't Ask Don't Tell: The Case of Indonesian Military	The Diplomat (Opinion Piece)
11.	2021	Want to keep Papua in Indonesia? Let's talk about racism	Modern Diplomacy (Opinion Piece)

12.	2021	The Invisible victims of the Papua Conflict: The Nduga Regency Refugees	New Mandala (Opinion Piece)
13.	2024	Navigating a Multi-front Great Power Competition: The Impact of the Middle East Conflict on Indonesia's Strategic Environment	ISI Commentaries (Commentaries)
14.	2024	Making Sense of Prabowo Subianto's Overseas Visit to China, Japan and Malaysia	ISI Commentaries (Commentaries)
15.	2025	Will Turkey and Indonesia's Defense Industry Cooperation Thrive?	The Jakarta Post (Op. Ed.)
16.	2025	Indonesia steps up defence relationships, but stays non-aligned	The Strategist, ASPI (Commentaries)

Depok, 13 Februari 2026



Aisha R. Kusumasomantri